



**PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PEMERINTAH DESA TERHADAP PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA DI DESA KLAMBIR V KEBUN
KECAMATAN HAMPARAN PERAK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

DAMAYANTI BR.PARDEDE
1915100261

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH
DESA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA KLAMBIR
V KEBUN KECAMATAN HAMPARAN PERAK

NAMA : DAMAYANTI BR PARDEDE
N.P.M : 1915100261
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Akuntansi
TANGGAL KELULUSAN : 06 Maret 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Dr Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si

DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Dito Aditia Darma Nst, S.E., M.Si.

PEMBIMBING II



Dr Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Damayanti Br Pardede
Npm : 1915100261
Program Studi : Akuntansi
Jenjang : SI (sastra satu)
Judul Skripsi : Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap
Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Klambir V
Kebun Kecamatan Hampan Perak

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (Plagiat) ;
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Unpabuntutuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribukan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.



Maret 2024

Damayanti Br Pardede
1915100261

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Damayanti Br Pardede
Tempat Tanggal Lahir : Medan, 08 Agustus 1998
Npm : 1915100261
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Akuntansi
Alamat : Dsn. XIV Sukadamai Klambir V Kebun

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya tidak akan ada lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.



, Maret 2024

(Damayanti Br Pardede)

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan diolah menggunakan SPSS V.22. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat desa, tim pejabat pengelolaan keuangan desa yang di tunjuk oleh Kepala Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hampan Perak dan perwakilan warga sebanyak 40 orang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 40 responden. Teknik analisis data dalam penulisan ini menggunakan Uji Kualitas Data, Uji Asumsi Klasik, Regresi Linier Berganda, dan Uji Hipotesis. Hasil penelitian ini secara parsial diketahui bahwa Akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan keuangan Desa di Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hampan Perak. Secara parsial diketahui bahwa Transparansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keuangan Desa di Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hampan Perak karena memiliki sig. Secara simultan diketahui Akuntabilitas dan Transparansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan keuangan Desa di Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hampan Perak. Saran pada penelitian ini yaitu diharapkan perangkat desa dapat menambah pendukung laporan pekerjaan setiap kegiatan agar lebih jelas terlihat pembangunan desa, perangkat desa diharapkan dapat menambah akses masyarakat setempat untuk mendapatkan informasi tentang pengelolaan keuangan desa klambir V kebun dan perlunya mengevaluasi penggunaan ADD, agar efektif dan efisien serta tepat sasaran sehingga pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Keuangan Desa

ABSTRACT

This research uses a quantitative approach with data collection techniques using questionnaires and processed using SPSS V.22. The population in this study was all village officials, a team of village financial management officials appointed by the Head of Klambir V Kebun Village, Hamparan Perak District and 40 resident representatives. The sample used in this research was 40 respondents. The data analysis technique in this writing uses Data Quality Test, Classical Assumption Test, Multiple Linear Regression, and Hypothesis Testing. The results of this research partially reveal that accountability has a positive and significant influence on village financial management in Klambir V Kebun Village, Hamparan Perak District. It is partially known that transparency has a positive and significant influence on village finances in Klambir V Kebun Village, Hamparan Perak District because it has sig. Simultaneously, it is known that Accountability and Transparency have a positive and significant influence on Village financial management in Klambir V Kebun Village, Hamparan Perak District. The suggestion in this research is that it is hoped that village officials can add supporting work reports for each activity so that village development can be seen more clearly. and right on target so that community empowerment can be carried out.

Keywords: Accountability, Transparency, Village Financial Management

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat izinnya saya dapat menyelesaikan tugas akhir saya dengan judul “ Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Klambir V Kebon Kecamatan Hamparan Perak”.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Pada Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Selama studi dan dalam proses penyusunan ini, penulis telah memperoleh bantuan, dukungan dan pengarahan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE, MM. Selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Bapak Dr. E Rusiadi, SE., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Ibu Dr. Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan Selaku Dosen Pembimbing Kedua saya.
4. Bapak Dito Aditia Darma Nst, S.E.,M.Si. Selaku Dosen Pembimbing Pertama saya.
5. Kedua Orang Tua saya Ayahanda Burju Mangihut Pardede dan Ibunda Irene Br.Siahaan yang selalu memberikan bantuan baik moril maupun materil.
6. Bapak Suprayogo selaku Kepala Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak.

7. Saudara saya Imelda Pardede, Forlando Pardede, Antonius Pardede, Siska Pardede dan James Pardede yang turut serta mendukung dan membantu dalam masa Perkuliahan.
8. Putra Aulia dan Nova E.R Silaen yang turut serta membantu dalam proses penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Hal ini disebabkan karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta bagi semua pihak.

Medan, Maret 2024
Penulis

Damayanti br Pardede
NPM:1915100261

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Batasan Masalah.....	6
1.4 Rumusan Masalah	7
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.5.1 Tujuan Penelitian	7
1.5.2 Manfaat Penelitian	7
1.6 Keaslian Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Teori Agensi.....	10
2.1.1 Prinsip-Prinsip Teori Agensi.....	11
2.2 Pengertian Akuntabilitas	12
2.2.1 Dimensi Akuntabilitas	14
2.2.2 Indikator Akntabilitas	18
2.3 Pengertian Transparansi.....	19
2.3.1 Indikator Transparasi	20
2.4 Pengelolaan Keuangan Desa.....	21
2.4.1 Indikator Pengelolaan Keuangan Desa	28
2.5 Penelitian Terdahulu.....	29
2.6 Kerangka Konseptual	32
2.7 Hipotesis	35
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Pendekatan Penelitian.....	38
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	38
3.2.1 Tempat Penelitian	38
3.2.2 Waktu Penelitian.....	38
3.3 Populasi dan Sampel	39

3.3.1 Populasi.....	39
3.3.2 Sampel.....	40
3.4 Jenis dan Sumber Data	42
3.4.1 Jenis Data	42
3.4.2 Sumber Data	42
3.5 Variabel penelitian dan Defenisi Operasional	42
a. Variabel Penelitian	42
b. Defenisi Operasional	43
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.7 Teknik Analisis Data.....	45
1. Uji Kualitas Data	46
a. Uji Validitas	46
b. Uji Reliabilitas	46
2. Uji Asumsi Klasik	47
3. Uji Hipotesis	49
4. Uji F	50
5. Uji R2 (Koefisien Determinasi)	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
4.1 Gambaran dan Objek Penelitian	53
4.1.1 Gambaran Umum dan Sejarah Desa Klambir V Kebun ...	53
4.1.2 Kondisi Geografis Desa Klambir V Kebun	53
4.1.3 Gambaran Demografis Desa Klambir V Kebun	54
4.1.4 Visi dan Misi Desa Klambir V Kebun	55
4.1.5 Potensi Desa Klambir V Kebun	56
4.1.6 Struktur Organisasi Desa	56
4.2 Penyajian Data	59
4.3 Analisis dan Evaluasi	59
1 Pengujian Instrumen Penelitian	60
2 Uji Asumsi Klasik	62
3. Uji Regresi Linear Berganda	66
4. Uji Hipotesis	68
4.4 . Pembahasan	71
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	75
5.1 Kesimpulan	75
5.2 Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Penyaluran Dana Desa Klambir 5 Kebun	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	29
Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian	38
Tabel 3.2 Data Populasi Penelitian	39
Tabel 3.3 Data Sampel yang diteliti	41
Tabel 3.4 Operasional Variabel	43
Tabel 3.5 Kriteria Pengukuran Skala Likert	44
Tabel 4.1 Letak dan Geografis Desa Klambir V Kebun	54
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin Desa Klambir V Kebun	54
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Per Golongan Umur Tahun 2020	55
Tabel 4.4 Demografi Responden	59
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Akuntabilitas (X1)	60
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Transparansi (X2)	61
Tanel 4.7 Hasil Uji Validitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	61
Tabel 4.8 Hasil Ujia Reliabilitas	62
Tabel 4.9 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov	63
Tabel 4.10 Hasil Uji Multi Kolinieritas	65
Tabel 4.11 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	67
Tabel 4.12 Hasil Uji t (Parsial)	68
Tabel 4.13 Hasil Uji F (Simultan).....	69
Tabel 4.14 Hasil Uji Koefisien Determinasi	70

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran	34
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	57
Gambar 4.2 Uji Normalitas P-Plot	64
Gambar 4.3 Uji Normalitas Histogram	64
Gambar 4.4 Grafik Scatterplot.....	66

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik dicirikan oleh tiga pilar utama yang merupakan elemen dasar yang saling terkait, yaitu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas (Garung dan Ga, 2020). Pemerintah desa dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut adalah dengan mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel dan partisipatif.

Sejalan dengan tujuan tersebut, untuk mendukung pemerintahan desa Dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditransfer ke seluruh desa dengan tujuan pemerataan pembangunan desa, diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

Akuntabilitas adalah kewajiban seseorang atau sebuah organisasi untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil serta hasil yang dicapai. Dalam konteks pemerintahan atau organisasi publik, akuntabilitas berarti kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban terhadap penggunaan anggaran dan keputusan kebijakan publik yang diambil oleh pejabat atau lembaga yang memiliki kewenangan.

Transparansi dalam penggunaan dana desa merupakan salah satu faktor yang sangat penting. Dana desa merupakan sejumlah uang yang sangat penting untuk pembiayaan pembangunan desa, sehingga penyalurannya harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang minimal. Transparansi dana desa merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah, baik dalam hal pengumpulan, pengolahan, maupun pemanfaatan dana.

Desa merupakan salah satu cabang pemerintahan yang memiliki tujuan utama mentransformasi masyarakat yang berada di bawah kendali pemerintah dengan tetap menjunjung tinggi konstruksi pemerintahan. Berlandaskan hal ini, terbitlah peraturan-peraturan atau peraturan-undangan yang berhubungan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintah desa, sehingga roda roda pemerintahan berjalan dengan optimal (Dewi & Adi, 2019). Undang-Undang tentang negara yang diterbitkan pada tahun 2014, yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dimana dalam UU tersebut menjelaskan bahwa desa pada tahun 2015 akan mendapatkan aliran dana sebesar 10% dari APBN. Alokasi APBN sebesar 10% akan menyebabkan pendanaan desa meningkat sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 bab 5 pasal 20 sampai 43, pengembangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan desa menjadi prioritas utama dalam Pembangunan Nasional. Desa Klambir V Kebun adalah desa yang termasuk besar karena jumlah dusunnya mencapai 21. Bukan hanya itu di desa tersebut jumlah kepala keluarga (KK) hampir delapan ribu banyaknya.

Tabel 1.1 Penyaluran Dana Desa klambir 5 kebun

No	Tahun	Anggaran Pendapatan Desa	Realisasi Pendapatan Desa	Pembiayaan
1	2020	Rp. 2.032.934.000	Rp.2.035.934.000	Rp.1.614.628.058,83
2	2021	Rp. 2.169.908.000	Rp.2169.908.000	Rp. 2.129.552.058
3	2022	Rp. 2.263.381.103	Rp.2.270.400.103	Rp.1.796.135.903,66

Sumber:Data Desa Klambir V Kebun diolah,2023

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dana desa yang diperoleh cukup besar dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Oleh karena itu, semakin besar dana desa yang disalurkan maka semakin besar juga tanggung jawab dalam pengelolaannya. Pengelolaan dana desa yang besar ini sangat rentan terjadi praktik penyelewengan yang mengarah pada tindak korupsi oleh aparatur desa itu sendiri. Dikutip dari (<https://www.jawapos.com>) terdapat data yang menunjukkan bahwa di beberapa daerah khususnya di Indonesia, terdapat 215 kepala desa yang terlibat dalam kasus korupsi dana desa. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan terhadap akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa serta mempertimbangkan peran dari aparatur desa dalam melaksanakan program keuangan desa.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan yang telah dilakukan peneliti pada Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak. Pemerintah desanya belum bisa dikatakan transparan dalam mengungkapkan keseluruhan tentang proses Pengelolaan Keuangan Desa dikarenakan Masyarakat Desa belum dilibatkan dalam membahas suatu masalah terutama mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.

Berita sumut Tribun-Medan.com mengungkapkan bahwa Desa Klambir 5 kebun merupakan salah satu desa yang mendapatkan dana desa paling besar di kabupaten Deli Serdang pada tahun 2023. Dengan adanya isu tersebut pemerintahan desa Klambir 5 Kebun kurang Akuntabel terhadap pengelolaan keuangan desa yang

mengakibatkan ketidakjelasan pelaksanaan dan Pengelolaan keuangan desa di Desa Klambir 5 Kebun. Desa klambir V Kebun merupakan desa yang terletak di Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Desa ini memiliki potensi yang cukup besar dalam sektor pertanian dan peternakan, serta menjadi pusat perdagangan bagi beberapa desa di sekitarnya. Akuntabilitas dan Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa menjadi isu yang sering diperdebatkan. Besarnya dana yang diterima oleh desa tanpa disertai kapabilitas para aparat desa akan menimbulkan persoalan baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.

Dengan adanya dana desa yang diberikan, desa Klambir 5 Kebun diharapkan memanfaatkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui pengembangan sektor pertanian dan peternakan. Selain itu, dana desa juga dapat digunakan untuk memperbaiki sarana dan prasarana desa, seperti jalan dan jembatan yang rusak. Pemerintah desa untuk menjalankan pengelolaan dana desa secara transparan, yaitu dengan memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang anggaran dan penggunaan dana desa. Hal ini dapat dilakukan melalui penyampaian laporan keuangan secara terbuka dan partisipatif kepada masyarakat. Selain transparansi, masyarakat juga mengharapkan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa secara tepat waktu dan jelas. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan laporan keuangan yang lengkap dan akurat serta mengikuti mekanisme pengawasan dan audit yang ada.

Tidak sedikit Masyarakat ingin dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, pemerintah desa diharapkan untuk mengadakan forum-forum partisipatif yang memungkinkan

masyarakat untuk memberikan masukan dan kritik terhadap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dengan adanya keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah desa terhadap pengelolaan keuangan desa bisa lebih tepat sasaran dalam menggunakan dana desa tersebut khususnya pada Desa Klambir 5 kebun untuk memajukan kesejahteraan masyarakat di desa.

APBDes dapat menjadi cerminan kinerja dan kemampuan pemerintah desa dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di desa. Pada kenyataannya banyak ditemukan keluhan masyarakat yang berkaitan dengan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan skala prioritas, serta kurang mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Amsyal et al., 2021).

Dalam era otonomi daerah, dana desa menjadi salah satu instrumen yang efektif untuk mengembangkan potensi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Klambir 5 Kebun sebagai salah satu desa yang diharapkan memanfaatkan dana desa dengan baik, dan dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain di Kabupaten Deli Serdang untuk memanfaatkan dana desa dengan optimal demi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah yang lebih baik.

Berdasarkan dengan fenomena yang tertera maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak”

1.2 Identifikasi Masalah

Latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, serta untuk memperoleh kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas, maka penulis mengidentifikasi masalah yaitu:

- 1) Kurangnya tanggungjawab terhadap penggunaan anggaran desa kepada masyarakat. Diperlukan peran aktif dari pemerintah daerah, pihak-pihak terkait, serta masyarakat desa tersebut. Saat peneliti melakukan observasi tidak ditemukan struktur organisasi di Kantor Klambir V Kebun, serta kurangnya tata Kelola yang baik di Kantor Kepala Desa Klambir V. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk keharusan seorang pimpinan untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku (Sabeni, Ghozali/2001).
- 2) Transparansi dalam pengelolaan keuangan Desa Klambir 5 Kebun, Kecamatan Hampan perak masih tergolong rendah kurang Transparan/terbuka dalam mempertanggungjawabkan anggaran desa yang diterima setiap tahunnya. Sebiknya aparatur desa lebih memberikan Masyarakat desa akses untuk mendapatkan informasi tentang keuangan Desa. Dari hasil observasi terhadap beberapa Masyarakat di desa , mereka mengungkapkan bahwa mereka tidak pernah mengetahui jumlah anggaran dana desa setiap tahunnya dan penggunaannya seperti apa.

1.3 BatasanMasalah

Batasan masalah pada penelitian ini hanya pada:

1. Pembatasan dalam penelitian ini hanya tentang Akuntabilitas dan Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan dana desa di Desa Klambir 5 Kebun Kecamatan Hampan Perak.

2. Data yang diperoleh mengacu pada tahun 2020-2022

1.4 Rumusan Masalah

Menurut latar belakang penelitian yang telah diuraikan, identifikasi masalah dan batasan masalah yang penulis rumuskan yaitu:

- 1) Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Klambir 5 Kebun Kecamatan Hamparan Perak?
- 2) Apakah transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Klambir 5 Kebun Kecamatan Hamparan Perak?
- 3) Apakah akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Klambir 5 Kebun Kecamatan Hamparan Perak?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk membuktikan secara empiris pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa Klambir 5 kebun Kecamatan Hamparan Perak.
- 2) Untuk membuktikan secara empiris pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa Klambir 5 kebun Kecamatan Hamparan Perak.
- 3) Untuk membuktikan secara empiris pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa Klambir 5 kebun Kecamatan Hamparan Perak.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan pengetahuan khususnya pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa.

2) Manfaat Praktis

a) Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau masukan tentang pentingnya akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa dan dijadikan sebagai bahan referensi maupun tinjauan secara nyata yang mendiskripsikan sejauh mana kinerja pemerintah untuk mewujudkan *good government dan good governance*.

b) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya ilmu pengetahuan, dalam melakukan penelitian di bidang sektor publik sesuai denganteori-teori keuangan yang telah dipelajari sehingga dapat diterapkan pada kejadian nyata.

c) Bagi Almamater

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai penambah wawasan dan bahan referensi atau acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

1.6 Keaslian Penelitian

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang berjudul “**Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa**” (Kurniawan, 2019).

Sedangkan penelitian ini berjudul Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Klambir 5 kebun Kecamatan Hamparan Perak.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan peneliti sebelumnya yang terletak pada:

- 1) Penelitian terdahulu menggunakan 3 variabel Bebas dan 1 variabel terikat, sedangkan penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat.
- 2) Penelitian terdahulu obyek penelitian yaitu pada Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo, sedangkan penelitian ini pada Desa Klambir 5 Kebun Kecamatan hampan perak.
- 3) Waktu penelitian penelitian terdahulu dilakukan tahun 2019 sedangkan penelitian ini dilakukan tahun 2023.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Agensi

Teori keagenan kontrak antara pihak manajemen pelaksana (*Agents*) dengan pemilik (*principal*). Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, prinsipal adalah masyarakat atau warga desa yang mempercayakan pengelolaan keuangan desa kepada pemerintah desa sebagai agen.

Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara principals dan agents dan dapat dijelaskan sebagai berikut Pihak principals adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain yaitu agens, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (*principals*) memerintah orang lain (*agents*) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi *principals*.

Widagdo dan Utomo (2019) menyatakan bahwa Dalam konteks penelitian ini yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Teori agensi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Prinsipal (Masyarakat) memiliki kepentingan alam pengelolaan keuangan desa yang baik dan transparan, sehingga mengharapakan pihak agen (pemerintah desa) untuk mengelola keuangan desa secara akuntabel dan transparansi.

- 2) Agen (Pemerintah Desa) memiliki kepentingan dalam mengoptimalkan penggunaan dana desa .

Dengan adanya mekanisme pengawasan yang efektif, agen(pemerintah desa) akan lebih cenderung untuk mengelola keuangan desa dengan lebih akuntabel dan transparan, karena mereka harus bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa kepada prinsipal (masyarakat atau pemerintah).

Pemerintahan di daerah Indonesia secara langsung Teori Agensi sebenarnya telah dipraktikkan, pada organisasi sektor publik yang dimaksud principals adalah Pemerintah dan agents dalam hal ini adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya. Teori keagenan ini digunakan untuk mengawasi dan mengontrol aliran dana yang diperoleh dari pemerintah pusat yang diserahkan oleh pemerintah desa. Teori tersebut diperlukan untuk mengawasi pemerintah desa dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa.

2.1.1 Prinsip- Prinsip Teori Agensi

Berikut adalah beberapa prinsip teori agensi:

- 1) Prinsip keagenan: Agensi terjadi ketika satu pihak (pemberi tugas) mempekerjakan agen untuk melakukan tugas atau tanggung jawab tertentu.
- 2) Prinsip tujuan: Agensi didasarkan pada tujuan yang harus dicapai oleh agen dalam melaksanakan tugasnya.
- 3) Prinsip kepercayaan: Pemberi tugas harus mempercayai agen untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan mematuhi instruksi yang diberikan.

- 4) Prinsip insentif: Agensi dapat berhasil jika pemberi tugas memberikan insentif yang memadai kepada agen dalam melaksanakan tugasnya.
- 5) Prinsip monitoring: Pemberi tugas perlu melakukan pengawasan terhadap agen untuk memastikan bahwa tugas atau tanggung jawab yang diberikan sudah terlaksana dengan baik.
- 6) Prinsip akuntabilitas: Agen harus bertanggung jawab atas kinerjanya dalam melaksanakan tugas dan harus siap menerima sanksi jika tidak memenuhi harapan pemberi tugas.
- 7) Prinsip keterlibatan: Pemberi tugas harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas agar dapat memastikan keberhasilan agensi.

Prinsip-prinsip ini merupakan hal penting untuk diketahui dalam konteks hubungan agen dan pemberi mandat agar dapat memastikan tercapainya tujuan yang diinginkan.

2.2 Pengertian Akuntabilitas

Pengertian akuntabilitas adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal), (Mahmudi, 2019).

Dalam arti lain Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan atau keputusan yang diambil oleh individu atau organisasi. Akuntabilitas sering kali terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah atau perusahaan, tetapi juga dapat mencakup individu atau organisasi lainnya.

Undang Undang No.6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah. Maka dari itu, untuk konteks pemerintahan desa kuasa pengelolaan keuangan desa termasuk dana desa diserahkan kepada perangkat daerah dalam hal ini adalah perangkat desa yaitu Kepala Desa. Hal ini sejalan dengan isi UU.No.6 Tahun 2014 pasal 26 Ayat 2 huruf c, bahwa “ Kepala desa berwenang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan aset desa”. Secara garis besar maka Kepala Desa sebagai penanggung jawab atas pengelolaan dana desa tersebut.

Bentuk tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa adalah menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan dana desa yang transparansi, jelas dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Tidak hanya itu Tuntutan dilakukannya Akuntabilitas Publik mewajibkan pemerintah daerah untuk tidak hanya melakukan laporan vertikal (pelaporan kepada pusat) namun juga pelaporan horizontal (pelaporan pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat luas) sebagai bentuk *horizontal accountability*.

Tujuan dari akuntabilitas adalah untuk memastikan bahwa individu atau organisasi bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memberikan pertanggung jawaban atas penggunaan sumber daya dan keputusan yang mereka buat. Akuntabilitas juga dapat meningkatkan transparansi, integritas, dan kepercayaan masyarakat terhadap individu atau organisasi yang bertanggung jawab.

Secara umum, akuntabilitas memiliki beberapa tujuan, antara lain:

- 1) Mendorong kepatuhan dan ketaatan terhadap aturan dan standar yang telah ditetapkan.
- 2) Mencegah atau mengurangi penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan pelanggaran hukum lainnya.
- 3) Memastikan bahwa sumber daya, baik itu keuangan atau sumber daya lainnya, digunakan secara efisien dan efektif.
- 4) Meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap individu atau organisasi yang bertanggung jawab.
- 5) Menyediakan dasar untuk memperbaiki kinerja dan melakukan perubahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2.2.1 Dimensi Akuntabilitas

Undang Undang desa ada tiga jenis akuntabilitas, yakni akuntabilitas fiskal, akuntabilitas sosial, dan akuntabilitas birokratik.

1. Akuntabilitas fiskal adalah bentuk pengendalian dari pimpinan mengarah ke bawah dan juga mengarah sejajar atau horizontal. Pemimpin dari pengendalian yang mengarah ke bawah yang dimaksud adalah bupati/walikota, sedangkan pemimpin pengendalian sejajar atau horisontal adalah Badan Perwakilan Desa (BPD). Kekuatan pengendalian akuntabilitas ini diasumsikan tergolong tinggi karena kedudukannya bersifat formal dalam sistem pemerintahan. Indikator akuntabilitas fiskal terkait dengan tata administrasi dan keuangan. Pemimpin pengendali diharapkan memiliki ketertarikan yang besar

terhadap dokumen-dokumen resmi keuangan, sehingga pengawasan vertikal dan horisontal diharapkan terwujud.

2. Akuntabilitas sosial termasuk ke dalam bentuk pengendalian pimpinan eksternal yang mengarah ke atas. Akuntabilitas ini dicirikan oleh adanya upaya masyarakat sipil, individu dan kelompok, serta media yang menekan pengambilan keputusan untuk meminta informasi dan penjelasan atas semua keputusan di ranah kewenangannya. Indikator akuntabilitas sosial mencakup aturan main dan prosedur penyampaian informasi ke masyarakat; ketersediaan dokumen non-formal, baik tertulis maupun lisan, kemudahan akses warga terhadap pengelolaan dan dokumen resmi, adanya pengetahuan dan pengalaman warga mengenai aspek-aspek tersebut, serta penerapan sanksi apabila gagal menjalankannya.
3. Akuntabilitas birokratik adalah pengendalian internal yang mengarah ke bawah. Dalam akuntabilitas ini, kepala desa berkedudukan sebagai pemimpin, sedangkan pegawai desa sebagai agen. Indikator akuntabilitas birokratis mencakup dokumen laporan keuangan tiap semester dan tiap tahun dari perangkat desa berupa: dokumen rencana kegiatan pemerintah, dokumen rancangan anggaran pendapatan belanja desa, peraturan desa mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa, bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah, dokumen rencana anggaran biaya yang sudah disahkan dan diverifikasi, buku pembantu kas kegiatan, dokumen surat permintaan pembayaran yang ditujukan ke kepala desa; dokumen peraturan kepala desa tentang perubahan pada anggaran

pendapatan dan belanja desa, serta penerapan sanksi berdasarkan UU dan peraturan yang ada jika gagal melaksanakannya. Dokumen-dokumen ini nantinya menjadi indikator akuntabilitas fiskal.

Dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik tersebut antara lain (Mahmudi, 2019).

1) Akuntabilitas hukum dan kejujuran

Akuntabilitas hukum terkait dengan undang-undang dan peraturan lainnya yang diisyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penyalahgunaan jabatan, korupsi, dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.

2) Akuntabilitas manajerial

Akuntabilitas manajerial dapat diartikan sebagai akuntabilitas kinerja, yaitu tanggung jawab untuk menyelenggarakan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

3) Akuntabilitas program

Akuntabilitas program dapat diartikan bahwa rencana organisasi harus menjadi rencana yang berkualitas tinggi dan mendukung strategi untuk mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus bertanggungjawab atas rencana yang telah mengimplementasikan rencana tersebut.

4) Akuntabilitas kebijakan

Lembaga publik harus mengambil tanggung jawab atas kebijakan yang memperhitungkan dampak di masa depan. Ketika merumuskan strategi, seseorang harus mempertimbangkan apa tujuan dari strategi itu dan mengapa harus diterapkan.

5) Akuntabilitas finansial

Akuntansi finansial adalah lembaga publik bertanggungjawab atas penggunaan dana publik secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas finansial sangat penting karena merupakan fokus utama masyarakat. Sistem akuntabilitas ini mengharuskan lembaga publik menghasilkan laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja organisasi keuangan kepada pihak luar.

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk keharusan/kewajiban seorang pemimpin untuk menjamin bahwa tugasnya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Permendagri No.113 2014 bentuk pertanggungjawaban terdiri dari:

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:

1. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan,

2. Format Laporan Kekayaan Milik Desa Per 31 Desember Tahun Anggaran Berkenaan,
 3. Format Laporan Program Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Yang Masuk Ke Desa.
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

2.2.2. Indikator Akuntabilitas

Adapun indikator-indikator yang dirangkum untuk melihat keberhasilan suatu aparatur desa dalam hal akuntabilitas menurut Mahmudi (2015) berikut adalah indikator dari akuntabilitas yaitu:

- 1) Pertanggungjawaban hukum Akuntabilitas kejujuran dan hukum adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku.
- 2) Pertanggungjawaban kinerja Akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efisien dan efektif.
- 3) Pertanggungjawaban program Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
- 4) Pertanggungjawaban kebijakan Akuntabilitas kebijakan adalah pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

- 5) Pertanggungjawaban finansial Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik secara ekonomi, efisien, dan efektif.

2.3 Pengertian Transparansi

Transparansi adalah memberikan suatu informasi yang terbuka baik itu mengenai informasi keuangan maupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan menjamin akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi tersebut: (Kurniawan, 2019).

Transparansi juga dapat diartikan sebagai sifat atau kondisi dimana informasi atau kegiatan yang berkaitan dengan suatu hal secara jelas dan terbuka dapat diakses dan dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan. Hal ini mencakup keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, pelaporan keuangan, pengungkapan informasi, serta akses terhadap dokumen atau data terkait. Dalam konteks pemerintahan atau bisnis, transparansi sering dianggap sebagai prinsip yang penting untuk menjaga akuntabilitas, mencegah korupsi, dan membangun kepercayaan publik. Tujuan transparansi adalah untuk memungkinkan akses terbuka dan jujur kepada informasi dan proses yang terkait dengan suatu organisasi, kebijakan, atau kegiatan. Dengan kata lain, transparansi berarti memberikan akses terbuka dan jelas kepada informasi yang relevan dan penting bagi publik.

Beberapa alasan utama mengapa transparansi penting adalah:

- 1) Mendorong akuntabilitas: Transparansi dapat membantu mendorong akuntabilitas dalam tindakan dan keputusan yang dibuat oleh organisasi atau individu. Ketika orang tahu apa yang terjadi, mereka dapat menentukan apakah tindakan tersebut adil atau tidak.

- 2) Meningkatkan kepercayaan: Dengan memberikan akses terbuka dan jelas kepada informasi, organisasi dapat membangun kepercayaan dengan publik dan meningkatkan legitimasi mereka di mata masyarakat.
- 3) Meningkatkan partisipasi: Transparansi dapat mendorong partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan. Ketika orang tahu apa yang terjadi dan informasi apa yang tersedia, mereka dapat memberikan masukan yang lebih baik dan lebih beralasan.
- 4) Meningkatkan efisiensi: Dengan memungkinkan akses terbuka dan jelas kepada informasi, organisasi dapat mengurangi biaya dan waktu yang terkait dengan permintaan informasi yang berulang-ulang dan proses komunikasi yang tidak efisien.

Dalam keseluruhan, transparansi dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih terbuka, jujur, dan akuntabel. Adapun pihak-pihak yang akan menggunakan informasi keuangan desa adalah:

- a) Masyarakat desa
- b) Perangkat desa
- c) Pemerintahan Daerah
- d) Pemerintahan Pusat

2.3.1 Indikator Transparansi

Terdapat beberapa indikator dalam transparansi adalah sebagai berikut. (Ardiyanti, 2019).

- 1) Sistem keterbukaan dan standarisasi

Adanya musyawarah rencana penggunaan keuangan desa dimana agar masyarakat dapat bertukar pendapat dan menyampaikan harapannya untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.

2) Fasilitas pelayanan public

Adanya akses terhadap informasi terkait rencana penggunaan keuangan. Informasi yang sulit dipahami dan informasi tersebut telah dikategorikan dan disajikan dalam format yang kurang rinci, sehingga tidak membutuhkan waktu lama untuk mendapatkannya.

3) Adanya pelaporan informasi

Laporan informasi yang berupa: informasi pendapatan desa, informasi belanja desa dan informasi pembiayaan desa perlu diketahui masyarakat. Keterbukaan laporan pertanggungjawaban keuangan tingkat desa dapat mencegah penghapusan kekuasaan pemerintah, karena masyarakat akan memperoleh informasi yang benar dan faktual serta kebohongan sulit dilakukan.

4) Adanya penyebaran informasi

Masyarakat perlu bekerjasama dengan media massa dan lembaga swadaya masyarakat untuk memahami keterbukaan informasi tentang hasil pelaksanaan pembangunan desa, bentuk penyebaran informasi juga dapat berupa pembuatan spanduk yang berisikan tentang hasil pelaksanaan Pembangunan desa setiap akhir tahun sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang paling luas terkait dengan pemerintahan dan pelayanan pembangunan.

2.4 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Kamaroesid).

1) Perencanaan

Pemerintah desa Menyusun perencanaan Pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya yang mengacu pada perencanaan Pembangunan Kabupaten dan Kota.

Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a) Sekretaris Desa Menyusun Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian Sekretaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa.
- b) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa kepada Badan Pemusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut.
- c) Rancangan tersebut kemudian disepakati Bersama, dan kesepakatan tersebut paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
- d) Kepala Desa menyampaikan Rancangan kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi
- e) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan. Jika dalam 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka Peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- f) Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya evaluasi.

- g) Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja.
- h) Apabila evaluasi tidak dilanjutkan kepala desa dan kepladesa tetap menetapkan Rancangan Peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- i) Pembatala peraturan desa sekaligus menyatakan pagu APBDesa tahun anggaran sebeumnya.
- j) Kepala desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya kepala desa Bersama BPD mencabut peraturan desa tersebut.

2) Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

Beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa:

- a) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan peraturan desa.
- b) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.

- c) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan.
- d) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu dibuat rancangan yang rinci.

3) Penatausahaan

Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara desa wajib bertanggungjawabkan uang melalui pertanggungawaban.

Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat 10 bulan berikutnya (Sujarweni, 2019).

Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat bendahara desa adalah:

Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.

4) Pelaporan

Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban, kepala desa wajib melaksanakan tugas sebagai berikut:

- 1) Menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa: Laporan semester pertama berupa Laporan Realisasi APBDesa, dan Laporan Semester akhir tahun.

- 2) Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota
- 3) Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/walikota.
- 4) Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

5) Pertanggungjawaban

Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 Pertanggungjawaban terdiri dari:

- 1) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:
 - a) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan,
 - b) Format Laporan Kekayaan Milik Desa Per 31 Desember Tahun Anggaran Berkenaan,
 - c) Format Laporan Program Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Yang Masuk Ke Desa.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Undang-Undang Desa Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APBD desa, juga dapat didanai pada anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (Tedi et al., 2020).

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/ bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, Alokasi anggaran dari anggaran pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, Serta Hibah dari sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Adapun Tujuan pengelolaan keuangan desa adalah untuk mengelola dana desa secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, sehingga dapat mendukung pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa tujuan pengelolaan keuangan desa antara lain:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik kepada masyarakat desa
2. Memastikan penggunaan dana desa sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah disepakati
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa

4. Menjamin keadilan dan keberlanjutan pembangunan desa
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa
6. Membangun sistem pengendalian internal dan akuntansi yang baik untuk mencegah kecurangan dan penyalahgunaan dana desa.

Beberapa contoh pengelolaan keuangan desa yang dapat mendukung tujuan tersebut antara lain:

1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Desa (RKAD) yang terukur dan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan desa
2. Penggunaan Sistem Informasi Keuangan Desa (SIKD) yang dapat memudahkan pengelolaan dan pengawasan keuangan desa
3. Peningkatan kapasitas dan keterampilan SDM aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa melalui pelatihan dan pembinaan
4. Peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa melalui penyelenggaraan musyawarah desa dan pertanggungjawaban keuangan desa
5. Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Tim Pengawasan Intern Pemerintah Desa (TPIPD) untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah disepakati serta mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa
6. Penyusunan laporan keuangan desa secara teratur dan akurat untuk memudahkan pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan desa kepada masyarakat dan instansi terkait.

APBDes adalah salah satu alat perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Bab IV Pasal 8 Permendagri no.113 Tahun 2014. APBDes merupakan program keuangan tahunan pemerintah desa yang terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Perencanaan dan pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh desa, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa memiliki banyak peluang untuk mengatur sendiri pemerintahan dan pembangunannya guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Peran yang dijalankan oleh desa begitu besar sehingga tentunya harus memikul tanggung jawab yang sangat besar. Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengelolaan anggaran desa dapat mencapai hasil yang terbaik dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang anggaran dana desa, sehingga menunjukkan hasil yang paling besar seperti rendahnya kemiskinan, adanya peningkatan pendapatan asli desa, dan tingkat pendidikan yang tinggi, terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan hasil yang optimal. Dalam rangka peningkatan kapasitas seluruh pemangku kepentingan yang ada di desa diharapkan tata kelola desa dapat ditingkatkan. Penegakan undang-undang desa juga dapat berjalan dengan baik.

2.4.1 Indikator Pengelolaan Keuangan Desa

Budiana & Fahmi (2021) menyebutkan bahwa beberapa indikator pengelolaan keuangan desa yang penting adalah:

- 1) Ketersediaan anggaran yang memadai yang dimaksud dalam hal ini ialah anggaran harus dimuat dalam unit moneter, anggaran sebaiknya ditinjau, diproses dan disetujui oleh otoritas yang lebih tinggi.

- 2) Transparansi dalam pengelolaan anggaran. Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Desa.
- 3) Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan keuangan. Keterlibatan masyarakat dalam mengambil keputusan keuangan merujuk pada partisipasi dan kontribusi dari anggota masyarakat des aitu sendiri dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan dana atau sumber daya keuangan yang bersifat publik atau bersama-sama.
- 4) Efektivitas pengelolaan anggaran untuk pencapaian tujuan pembangunan desa. Efektivitas pengelolaan anggaran untuk pencapaian tujuan pembangunan desa mengacu pada sejauh mana dana atau sumber daya yang dialokasikan untuk pembangunan desa dimanfaatkan dengan tepat dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini meliputi penggunaan anggaran secara efisien, tepat sasaran, dan sesuai dengan prioritas pembangunan desa.

2.5. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan dan panduan dalam penelitian, penulis berpedoman pada beberapa penelitian terlebih dahulu. Penelitian yang dimaksud sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Hasil penelitian
1	Kurniawan /2019	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa	Transparansi, Akuntabilitas dan peran Perangkat Desa	Pengelolaan Keuangan Desa	bahwa variabel transparansi dan variabel akuntabilitas berpengaruh positif dalam

					pengelolaan keuangan desa. Sedangkan variabel dari perangkat desa tidak berpengaruh dalam pengelolaan keuangan desa.
2	Sutrawati /2016	Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Perangkat desa	Akuntabilitas dan pengelolaan Dana Desa	bahwa peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan aturan yang diatur dalam Permendagri No.113 Tahun 2014. Secara keseluruhan, persentase kecocokan antara peran perangkat desa dan aturan yang diatur mencapai 80,11%.
3	Weny UIUfiah/2017	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan <i>Good Governance</i> Pada Desa Di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat	Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi	Pengelolaan dana desa	bahwa akuntabilitas, transparansi dan partisipasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan <i>Good Governance</i> pada desa di Kecamatan Merapi Barat.
4	Bahtiar dan Ardiansyah /2019	Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap	Akuntabilitas dan Transparansi	Pengelolaan dana Desa	secara umum telah dilaksanakan dengan

		Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa-Desa Di Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur			baik yang dibuktikan dengan jawaban responden yang sebagian besar menjawab Setuju dan Sangat Setuju.
5	Andriani M/2019	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Luk, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa	Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat.	Pengelolaan Dana Desa	Transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.
6	Risya, U dan Nuradin/2017	Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa	Transparansi dan Akuntabilitas	Pengelolaan Dana Desa	Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa
7	Astuti, R /2021	Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Tamalate Kabupaten Takalar	Transparansi dan Akuntabilitas	Pengelolaan Keuangan Desa	Keterbukaan sampai batas tertentu berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa Tamalate, Kabupaten Takalar. Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintah Desa Tamalate Kabupaten Takalar. keterusterangan dan tanggung jawab

					administrasi moneter memiliki pengaruh yang besar.
--	--	--	--	--	--

Sumber: data diolah(2023)

2.6 Kerangka Konseptual

Merevisi Permendagri No 07 Tahun 2008 tentang Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan memasukkan aspek pengawasan partisipatif oleh masyarakat, audit sosial, dan transparansi. Didalam peraturan tersebut ditujukan agar pemerintah daerah dapat mengelolah dana Desa dengan baik. Selain itu Transparansi dan Akuntabilitas juga merupakan hal penting dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien.

Keterusterangan/keterbukaan akan sangat mempengaruhi administrasi. Keterusterangan akan memperluas tanggung jawab pembuat strategi sehingga komando terbuka atas spesialis pembuatan pengaturan akan berjalan dengan sukses. (Astuti, 2021). Keterbukaan dapat diartikan aturan transparansi yang memungkinkan masyarakat umum untuk mengetahui dan mendapatkan akses yang seluas-luasnya terhadap data tentang dana teritorial. Dengan lugas, dapat menjamin akses atau kesempatan bagi setiap orang untuk mendapatkan data tentang organisasi pemerintahan, khususnya data tentang siklus pembuatan pengaturan, dan pelaksanaannya serta hasil yang dicapai.

Pengelolaan dana desa adalah sebuah proses pengelolaan dana yang diberikan oleh pemerintah kepada desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengelolaan dana desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mempercepat pembangunan di daerah terpencil. Namun, pengelolaan dana desa juga memerlukan konseptual yang baik agar dana

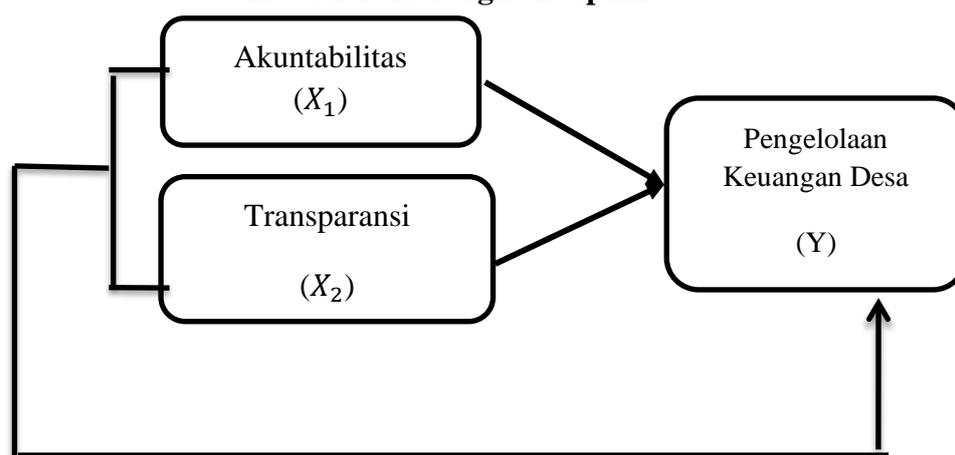
desa dapat digunakan secara efektif dan efisien. Konsep pengelolaan dana desa terdiri dari beberapa aspek, yaitu penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Dalam penganggaran, desa harus membuat rencana anggaran yang terperinci dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Pelaksanaan anggaran harus dilakukan dengan hati-hati dan profesional, agar tidak terjadi penyimpangan atau penyelewengan dana desa. Pengawasan harus dilakukan secara ketat dan berkesinambungan, baik dari pemerintah desa, pemerintah kabupaten/kota, maupun pemerintah provinsi. Evaluasi harus dilakukan secara periodik untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi dari pengelolaan dana desa. Pada praktiknya, pengelolaan dana desa juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat desa. Masyarakat desa harus terlibat dalam proses penganggaran dan pelaksanaan anggaran, sehingga dana desa dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang sebenarnya dan sesuai dengan aspirasi masyarakat desa. Partisipasi masyarakat desa juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Pengelolaan dana desa juga memerlukan dukungan dari pemerintah pusat, khususnya dalam hal kebijakan dan regulasi pengelolaan dana desa. Pemerintah pusat harus memastikan bahwa dana desa digunakan secara tepat sasaran dan tidak terjadi penyelewengan dana desa. Selain itu, pemerintah pusat juga dapat memberikan bantuan teknis dan finansial kepada pemerintah desa, sehingga pengelolaan dana desa dapat dilakukan dengan lebih baik dan profesional.

Kerangka Konseptual dalam penelitian ini yaitu adanya hubungan yang terjadi antara akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa, transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa, dan hubungan antara Akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa. Dalam hal ini menurut (Astuti

,2021) “Akuntabilitas dan Transparansi/Keterbukaan sampai batas tertentu berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Keuangan Desa”. Kemudian menurut Bahtiar dan Ardiansyah (2019) “Adanya pengaruh positif dan signifikan variabel (X1) Akuntabilitas dan Transparansi terhadap variabel (Y) pengelolaan keuangan desa”. Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut diketahui bahwa Akuntabilitas dan Transparansi dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan desa .

Gambar 2.1: Kerangka Berpikir



Sumber : Data yang diolah 2023

Dari kerangka Berpikir diatas didapatkan keterangan sebagai berikut: Pengaruh Akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa, Pengaruh Transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa dan arah pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini mencoba melihat pengaruh yang terdapat dalam akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa, pelaksanaan prinsip akuntabilitas dengan baik di pemerintah desa dapat meningkatkan kinerja dari pemerintah desa karena akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya publik serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada penerima amanat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam pengelolaan keuangan desa. Pengaruh

transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa, penerapan transparansi dapat digunakan sebagai sarana mencegah penyalahgunaan atau penyelewengan karena dengan adanya keterbukaan informasi mengenai dana desa dan sulit untuk disembunyikan.

2.7 Hipotesis

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan (Sugiyono, 2022).

1) Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Pelaksanaan prinsip akuntabilitas dengan baik di pemerintah desa dapat meningkatkan kinerja dari pemerintah desa karena akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya publik serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada entitas pelaporan atau penerima amanat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Ardiyanti, (2019) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang ditujukan adalah sebagai berikut :

H1 : Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa Klambir 5 Kebun Kecamatan Hampan Perak

2) Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah penyalahgunaan atau penyelewengan

karena dengan adanya keterbukaan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa kebohongan sulit untuk disembunyikan. Selain itu masyarakat dapat ikut serta dalam proses pengawasan atau pengendalian kebijakan. Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat sebab pemerintah sangat memiliki kewenangan dalam mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi banyak orang.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Ardiyanti, R (2019) bahwa transparansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan dari teori dan penelitian terdahulu di atas, maka hipotesis yang diajukan ialah sebagai berikut :

H2 : Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa Klambir 5 Kebun Kecamatan Hampan Perak

3) Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi dengan baik di pemerintah desa dapat meningkatkan kinerja dari pemerintah desa terkhususnya pengelolaan keuangan desa karena akuntabilitas dan transparansi sebagai pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya publik serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada entitas pelaporan atau penerima amanat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan dari teori dan penelitian terdahulu di atas, maka hipotesis yang diajukan ialah sebagai berikut :

H3: Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Klambir 5 Kebun Kecamatan Hampan Perak

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian Kuantitatif asosiatif, yaitu penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih, Sugiyono (2022). Dengan pendekatan kuantitatif tersebut dapat mengetahui pengaruh variabel bebas (akuntabilitas dan transparansi) terhadap variabel terikat (pengelolaan dana desa).

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Desa Klambir 5 Kebun Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang yang berada di jalan klambir 5 Kebun kecamatan Hampan Perak.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan mulai dari bulan Februari 2023 sampai dengan february 2024, dengan format sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Feb-Mar	Apr-Jun	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
1	Riset Awal/Pengajuan Judul	■										
2	Penyusunan Proposal		■									
3	Bimbingan proposal		■	■								
4	Seminar Proposal			■								
5	Perbaikan/ACC Proposal			■	■							
6	Pengolahan Data					■						
7	Penyusunan Skripsi					■	■					
8	Bimbingan Skripsi					■	■					
9	Seminar Hasil							■				
10	Perbaikan Seminar Hasil							■	■	■		
11	Sidang Meja Hijau										■	■

Sumber : Penulis 2023

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Aparatur Desa dan perwakilan warga Klambir 5 Kebun Kecamatan Hampan Perak yang berjumlah 40 orang.

Tabel 3.2 Data Populasi Penelitian

No	Nama	Jabatan	Tamatan
1	Sugiyono	Kepala Desa	S1
2	Hidayat	Sekretaris	S1
3	Sri Novia Sari	Kaur Keuangan	S1
4	Suci Dwicha Putri	Kaur Pemerintahan	S1
5	Zahratul Jannah	Kasi Kesejahteraan	S1
6	Wahyudi	Kasi Perencanaan	S1
7	Arya Fatwa Gumilang	Kaur Umum	SMA
8	Kusmayadi	Kasi Pelayanan	SMA
9	Ryan	Kepala Dusun I	SMA
10	Hardakwah	Kepala Dusun II	SMA
11	Sagiatan	Kepala Dusun III	SMA
12	Nahardi	Kepala Dusun IV	SMA
13	Hasriani	Kepala Dusun V	SMA
14	M.Basir	Kepala Dusun VI	SMA
15	Sufrianto	Kepala Dusun VII	SMA
16	Irfan Nasution	Kepala Dusun VIII	SMA
17	Dwi Sarah	Kepala Dusun X	SMA
18	Dani	Kepala Dusun XI	SMA
19	Agus Santoso	Kepala Dusun XII	SMA
20	Bagus Permana	Kepala Dusun XIII	SMA
21	Desi Permatasari	Kepala Dusun XIV	D3
22	Berliana Lubis	Kepala Dusun XV	SMA
23	Anisa Tarbiah	Kepala Dusun XVI	SMA
24	Bagas	Kepala Dusun XVII	SMA

25	Purnomo	Kepala Dusun XVIII	SMA
26	Agus Hermawan	Kepala Dusun XIX	SMA
27	Hermanto Lubis	Kepala Dusun XX	SMA
28	Hendrik L.CH	Kepala Dusun XXI	SMA
29	Efendi S	Anggota POKJA I	SMA
30	Suci Purnama	Anggota POKJA II	SMA
31	Budi Setiawan	Anggota POKJA III	SMA
32	Chintya	Anggota POKJA IV	SMA
33	Devi Ratna Sari	Anggota POKJA V	SMA
34	Agung Sanjaya	Anggota POKJA VI	SMA
35	Dimas Pratama	Anggota POKJAVII	SMA
36	Ayu Puspita	Anggota POKJA VIII	SMA
37	Novita S	Perwakilan Warga	SMA
38	Dedi Irwansyah	Perwakilan Warga	SMA
39	Rahmawati	Perwakilan Warga	SMA
40	Yuyun Puspita	Perwakilan Warga	SMA

Sumber: Kantor Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hampan Perak(2023)

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2022). Penelitian ini menggunakan sampel jenuh. Sampling jenuh adalah Teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu Aparatur Desa dan perwakilan warga desa Klambir 5 Kebun yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, Kaur Umum, Kasi Pembangunan, Kasi pemerintahan, Perencanaan Dan Keuangan dan Kepala dusun atau Kadus yang terkait dengan pengelola keuangan desa dan beberapa Perangkat Desa serta perwakilan Masyarakat Klambir 5 yang berjumlah 40 orang.

Sampel pada penelitian ini berjumlah 40 responden. Berikut data referensi yang diteliti:

Tabel 3.3 Data Sampel yang Diteliti

No	Nama	Jabatan	Tamatan
1	Sugiyono	Kepala Desa	S1
2	Hidayat	Sekretaris	S1
3	Sri Novia Sari	Kaur Keuangan	S1
4	Suci Dwicha Putri	Kaur Pemerintahan	S1
5	Zahratul Jannah	Kasi Kesejahteraan	S1
6	Wahyudi	Kasi Perencanaan	S1
7	Arya Fatwa Gumilang	Kaur Umum	SMA
8	Kusmayadi	Kasi Pelayanan	SMA
9	Ryan	Kepala Dusun I	SMA
10	Hardakwah	Kepala Dusun II	SMA
11	Sagiatan	Kepala Dusun III	SMA
12	Nahardi	Kepala Dusun IV	SMA
13	Hasriani	Kepala Dusun V	SMA
14	M.Basir	Kepala Dusun VI	SMA
15	Sufrianto	Kepala Dusun VII	SMA
16	Irfan Nasution	Kepala Dusun VIII	SMA
17	Dwi Sarah	Kepala Dusun X	SMA
18	Dani	Kepala Dusun XI	SMA
19	Agus Santoso	Kepala Dusun XII	SMA
20	Bagus Permana	Kepala Dusun XIII	SMA
21	Desi Permatasari	Kepala Dusun XIV	D3
22	Berliana Lubis	Kepala Dusun XV	SMA
23	Anisa Tarbiah	Kepala Dusun XVI	SMA
24	Bagas	Kepala Dusun XVII	SMA
25	Purnomo	Kepala Dusun XVIII	SMA
26	Agus Hermawan	Kepala Dusun XIX	SMA
27	Hermanto Lubis	Kepala Dusun XX	SMA
28	Hendrik L.CH	Kepala Dusun XXI	SMA
29	Efendi S	Anggota POKJA I	SMA
30	Suci Purnama	Anggota POKJA II	SMA
31	Budi Setiawan	Anggota POKJA III	SMA
32	Chintya	Anggota POKJA IV	SMA
33	Devi Ratna Sari	Anggota POKJA V	SMA
34	Agung Sanjaya	Anggota POKJA VI	SMA
35	Dimas Pratama	Anggota POKJAVII	SMA

36	Ayu Puspita	Anggota POKJA VIII	SMA
37	Novita S	Perwakilan Warga	SMA
38	Dedi Irwansyah	Perwakilan Warga	SMA
39	Rahmawati	Perwakilan Warga	SMA
40	Yuyun Puspita	Perwakilan Warga	SMA

Sumber: Kantor Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak(2023)

3.4 Jenis Dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Data primer dan data sekunder merupakan dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Data primer merupakan data yang diterima langsung dari sumber dan objek penelitian. Pengumpulan data kuisisioner yang dibagikan kepada responden dan wawancara kepada pihak yang mengambil Keputusan. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari lokasi dan subjek penelitian.

3.4.2 Sumber Data

Data subjek dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berasal dari hasil pengolahan kuisisioner yang telah diuji validitasnya selanjutnya data tersebut dianalisis lebih dalam untuk menghasilkan informasi tentang hubungan atau pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat.

3.5 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

a) Variabel Penelitian

Dalam peneltian ini digunakan dua variabel bebas dan 1 variabel terikat, yaitu:

- 1) Variabel bebas (Independent Variable)

Variabel bebas (X) adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, baik pengaruh negatif maupun positif. Variabel bebas dalam penelitian adalah akuntabilitas (X_1) dan Transparansi (X_2).

2) Variabel Terikat (Dependent Variable)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi akibat dari adanya variabel bebas. Variabel terikat dari penelitian ini adalah Pengelolaan Keuangan desa (Y).

b) Defenisi Operasional

Menurut Sari, A. N. (2018) Definisi operasional yaitu definisi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan atau mengubah konsep yang berupa konstruk dengan kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan diuji serta ditentukan kebenarannya oleh orang lain.

Tabel 3.4 Operasional Variabel

Variabel	Deskripsi	Indikator	Skala
Akuntabilitas (X1)	Pengertian akuntabilitas adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal). (Mahmudi, 2019).	Menurut Mahmudi (2015) yaitu: 1) Pertanggungjawaban hukum 2) Pertanggungjawaban kinerja publik 3) Pertanggungjawaban kebijakan 4) Pertanggungjawaban kebijakan 5) Pertanggungjawaban finansial	Instrument 5 butir pernyataan dengan menggunakan skala likert.
Transparansi (X2)	Transparansi adalah memberikan suatu informasi yang terbuka baik itu mengenai informasi keuangan maupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan menjamin akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi tersebut: (Kurniawan, 2019).	1) Sistem keterbukaan dan standarisasi 2) Fasilitas pelayanan public 3) Adanya akses terhadap informasi terkait rencana penggunaan keuangan.	Instrument 5 butir pernyataan dengan menggunakan skala likert.

		4) Adanya pelaporan informasi 5) Adanya penyebaran informasi (Ardiyanti (2019))	
Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Kamaroesid).	1) Ketersediaan anggaran yang memadai 2) Transparansi dalam pengelolaan anggaran. 3) Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan keuangan. 4) Efektivitas pengelolaan anggaran untuk pencapaian tujuan pembangunan desa. (Budiana & Fahmi (2021))	Instrument 4 butir pernyataan dengan menggunakan skala likert.

Sumber: Data yang diolah (2023)

Dalam penelitian ini metode pengambilan data yang diperoleh dari jawaban responden dengan menggunakan skala Likert.

Skala Likert adalah afeksi positif atau negatif yang berhubungan dengan beberapa objek psikologis. Objek sikap dapat berupa simbol, ungkapan, slogan, orang, institusi, ideal, ide, dsb (Syarifuddin A, 2016).

Berikut skala parameter:

Tabel 3.5 Kriteria Pengukuran Skala Likert

Kriteria	Skor
Sangat Tidak Setuju (STS)	1
Tidak Setuju (TS)	2
Ragu/Netral/Kurang Setuju (KS)	3
Setuju (S)	4
Sangat Setuju (SS)	5

Sumber : skala likert

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Sujarweni (2019) menyatakan metode pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas yang tinggi. Di dalam metode penelitian kuantitatif, ada beberapa metode dalam pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data melalui penyebaran angket yang berisi pertanyaan kepada seluruh responden pada penelitian ini.

Survei ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana prespektif dana desa dari sudut pandang masyarakat desa.

- 2) Wawancara (*interview*) yaitu teknik pengumpulan data melalui Tanya jawab secara langsung dengan perangkat desa yang menjadi responden pada penelitian ini.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses untuk mengekstrak informasi yang berguna dari data, melalui berbagai metode analisis statistik dan komputasi. (Sharma & Yadav, 2018). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji instrumen penelitian (uji validitas dan uji reliabilitas), uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis.

1) Uji Kualitas Data

Uji kualitas data penelitian dilakukan untuk menguji kecukupan dan kelayakan data yang digunakan dalam penelitian dan bertujuan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas.

Metode analisis data dalam pengujian ini adalah;

a) Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur atau menguji legal ataupun valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid bila Pertanyaan pada kuesioner sanggup untuk mengatakan suatu yang hendak diukur oleh kuesioner tersebut. Ghozali (2018). Metode yang digunakan untuk menguji validitas pada penelitian ini adalah menggunakan analisis faktor konfirmatori. Analisis faktor konfirmatori digunakan untuk menguji apakah suatu konstruk memiliki unidimensionalitas atau apakah indikator-indikator yang digunakan bisa mengkonfirmasi suatu konstruk ataupun variabel. Jika hasilnya signifikan maka indikator pada masing-masing pertanyaan adalah valid. Pengujian validitas ini dibantu dengan program SPSS 22. Sedangkan untuk mengetahui skor masing-masing item pertanyaan valid ataupun tidak, maka diterapkan kriteria statistik sebagai berikut:

- 1) Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ dan bernilai positif, maka variabel tersebut valid.
- 2) Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka variabel tersebut tidak valid.
- 3) Jika r_{hitung} lebih kecil r_{tabel} tetapi bertanda negatif, maka H_0 akan tetap ditolak dan H_1 diterima.

b) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner merupakan kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban dari waktu ke waktu dikatakan konsisten. Pengujian secara reabilitas suatu kuesioner untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama. Uji reliabilitas dimaksud untuk mengetahui sejauh mana hasil

pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama. Pengujian dilakukan dengan menghitung Cronbach Alpha dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60 Sujarweni(2014).

2) Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan tahap awal yang digunakan sebelum analisis regresi linear berganda maka terlebih dahulu perlu dilakukan suatu pengujian asumsi klasik atas data yang akan diolah sebagai berikut, Ghozali (2018):

a) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Untuk menguji multikolinieritas dengan cara melihat nilai VIF masing-masing variabel independen, jika nilai VIF < 10.00 maka dapat disimpulkan data bebas dari gejala multikolinieritas.

b) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram. Dasar pengambilan keputusan menurut Ghozali (2018) adalah:

- 1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikut arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi Normalitas.

2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi Normalitas.

c) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan secara varians residual satu pengamatan pengamatan lain. Heteroskedastisitas mempunyai suatu keadaan bahwa varian dari residual (selisih antara nilai observasi dengan nilai prediksi) suatu pengamatan yang lain berbeda. Untuk memenuhi asumsi heteroskedastisitas maka penyebaran residual pada grafik (*scatter plot*) terlihat tidak teratur.

d) Uji Regresi Linear Berganda

Sugiyono (2022), Analisis regresi linear berganda merupakan Teknik analisis data yang digunakan dalam menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Persamaan analisis linear berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Pengelolaan Keuangan Desa

α = Konstanta

β_1, β_2 = Koefisien variabel independen

X_1 = Transparansi

X_2 = Akuntabilitas

e = Standard Error

e) Uji Hipotesis

1) Uji t

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Uji t digunakan untuk mengukur signifikansi pengaruh pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai thitung masing-masing koefisien regresi dengan ttabel (nilai kritis) sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Ketentuan menilai hasil hipotesis uji t adalah menggunakan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan $df = n-1$ (Ghozali, 2018).

Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_o diterima dan H_a ditolak.
- b) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_o ditolak atau H_a diterima.

Atau dengan kriteria:

- a. Jika probabilitas (sig) $> 0,05$, maka H_o diterima dan H_a ditolak.
- b. Jika probabilitas (sig) $< 0,05$, maka H_o ditolak dan H_a diterima.

Bila terjadi penerimaan H_o maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan, sedangkan bila H_o ditolak artinya terdapat pengaruh yang signifikan.

Rancangan pengujian hipotesis statistik ini untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel independent (X) yaitu Pengaruh Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), terhadap Pengelolaan Keuangan Desa(Y), adapun yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- 1) $H_0: \beta_1 = 0$: Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Klambir 5 kebun Kecamatan Hampan Perak.
- 2) $H_a : \beta_1 \neq 0$: Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Klambir 5 kebun Kecamatan Hampan Perak.
- 3) $H_0: \beta_2 = 0$: Transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Klambir 5 kebun Kecamatan Hampan Perak.
- 4) $H_a : \beta_2 \neq 0$: Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Klambir 5 kebun Kecamatan Hampan Perak.

2) Uji F (*Goodness Of Fit*)

Uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual (*Goodness of Fit*). Uji F menguji apakah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah fit atau tidak Ghozali (2018). Ketentuan menilai hasil hipotesis uji F adalah berupa level signifikansi 5% dengan derajat kebebasan pemilang $df = k$ dan derajat kebebasan penyebut $(df) = n-k-1$ dimana k adalah jumlah variabel bebas. pengujian dilakukan dengan membandingkan kriteria:

- a) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak
- b) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Atau dengan kriteria:

a) Jika probabilitas (sig) $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

b) Jika probabilitas (sig) $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Jika terjadi penerimaan H_0 , maka dapat diartikan tidak berpengaruh signifikan model regresi berganda yang diperoleh sehingga mengakibatkan tidak signifikan pula pengaruh dari variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat.

Adapun yang menjadi hipotesis nol H_0 dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) $H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$: Akuntabilitas dan Transparansi tidak berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan desa di Desa Klambir 5 Kebun Kecamatan Hampan Perak.
- 2) $H_a: \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$: Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan desa di Desa Klambir 5 Kebun Kecamatan Hampan Perak.

3) Uji R² (Koefisien Determinasi)

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol dan satu, semakin mendekati 0 maka koefisien determinasi semakin kecil pengaruhnya terhadap variabel bebas, sebaliknya semakin mendekati 1 besarnya koefisien determinasi semakin besar pengaruhnya terhadap variabel bebas Ghozali (2018).

Oleh karena itu penelitian ini menggunakan adjusted R2 berkisar antara 0 dan 1. Jika nilai adjusted R2 semakin mendekati 1 maka semakin baik kemampuan model tersebut dalam menjelaskan variabel independent.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran dan Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum dan Sejarah Desa Klambir V Kebun

Pada akhir abad ke 18 s/d 19 pemerintahan di Kecamatan Hampan Perak dipimpin oleh seorang Datuk yang bernama Datuk Ahmad. Kecamatan Hampan Perak dibagi menjadi 20 desa dan didalamnya terdapat Desa Klambir V Kebun.

Desa Klambir Lima Kebun berada di Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Sebutan “Klambir V Kebun” memiliki arti yaitu “Kelapa Lima Kebun” yang berasal dari Bahasa Melayu Deli. Desa kelambir lima kebun merupakan desa dengan masyarakat tradisional yang bekerja sebagai petani sawit dominannya. Desa kelambir lima kebun memiliki banyak bentang alam yang sangat asri, karena masih banyak perkebunan seperti perkebunan sawit dan lainnya.

Desa klambir lima kebun memiliki potensi menciptakan objek wisata di daerahnya, tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik, sehingga masyarakat hanya mengandalkan mata pencarian tradisional yaitu berkebun untuk bertahan hidup.

4.1.2 Kondisi Geografis Desa Klambir V Kebun

Desa Klambir V Kebun adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Hampan Perak dan berada dibagian utara Kabupaten Deli Serdang.

Tabel 4.1 Letak dan Geografis Desa Klambir V Kebun

NO	KARAKTERISTIK	PENJELASAN
1	Letak wilayah	3°63 Lintang Utara 98°59 Bujur Timur
2	Luas Wilayah	2.558 Ha
3	Jumlah Dusun	21 Dusun
4	Batas-batas wilayah: Utara Selatan Timur Barat	Berbatasan dengan klambir V kampung Klumpang kebon Klumpang Kampung Paya bakung

Sumber: Data Desa Klambir V diolah(2023)

4.1.3 Gambaran Demografis Desa Klambir V Kebun

Sesuai data sampai dengan tahun 2021 jumlah penduduk Desa Klambir V Kebun sebesar 21.763 Jiwa. Dari segi pendidikan yang ditempuh penduduk dan dari segi kepercayaan yang dianut dapat dipaparkan sesuai tabel-tabel dibawah ini:

**Tabel 4.2 Jumlah Penduduk berdasarkan jenis Kelamin
Desa Klambir V Kebun**

Jenis Kelamin (Jiwa)		
Laki-laki	Perempuan	Jumlah
11.034	10.729	21.763

Sumber: data Desa Klambir V Kebun diolah,2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Jumlah penduduk desa Klambir sebanyak 21.763 jiwa Dimana yang berjenis kelamin laki- laki berjumlah 11.034 jiwa dan yang berjenis kelamin Perempuan 10.729 jiwa.

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Per Golongan Umur Tahun 2020

No	Golongan umur	Jumlah(jiwa)
1	0-4 Tahun	1.910
2	0-14 Tahun	5.850
3	14-15 Tahun	15.081
4	60+ Tahun	1.583
5	65+ Tahun	832

Sumber: Data Desa Klambir V Kebun diolah,2023

4.1.4 Visi dan Misi Desa Klambir V Kebun

a. Visi Desa Klambir V Kebun

Adapun visi Desa Klambir V Kebun yaitu Mewujudkan Desa Klambir V Kebun sebagai pusat bisnis pertanian di Desa Klambir V Kebun yang berazaskan iman dan taqwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

b. Misi Desa Klambir V Kebun

- 1) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang partisipatif, akuntabel, transparan, dinamis, dan kreatif.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kependudukan, dan ketenagakerjaan.
- 3) Meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan masyarakat melalui pengelolaan pertanian intensifikasi yang maju, unggul, dan ramah lingkungan menuju Desa Agrobisnis.
- 4) Meningkatkan infrastruktur desa melalui peningkatan prasarana jalan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruangan dan perumahan.

- 5) Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan perekonomian perdesaan.

Menyusun regulasi desa dan menata dokumen-dokumen yang menjadi kewajiban desa sebagai payung hukum pembangunan.

4.1.5 Potensi Desa Klambir V Kebun

a. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam Desa Klambir V Kebun sebagian besar ada di sektor pertanian. Tanah di Desa Klambir V Kebun sangat subur dan sangat cocok untuk dijadikan sebagai lahan pertanian.

b. Sumber Daya Manusia

Sesuai dengan potensi yang ada, terdapat berbagai macam mata pencaharian yang ditekuni oleh penduduk Desa Pebaloran. Mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa pebaloran adalah sebagai petani dan banyak juga terdapat Masyarakat yang mengambil kesempatan dalam berjualan.

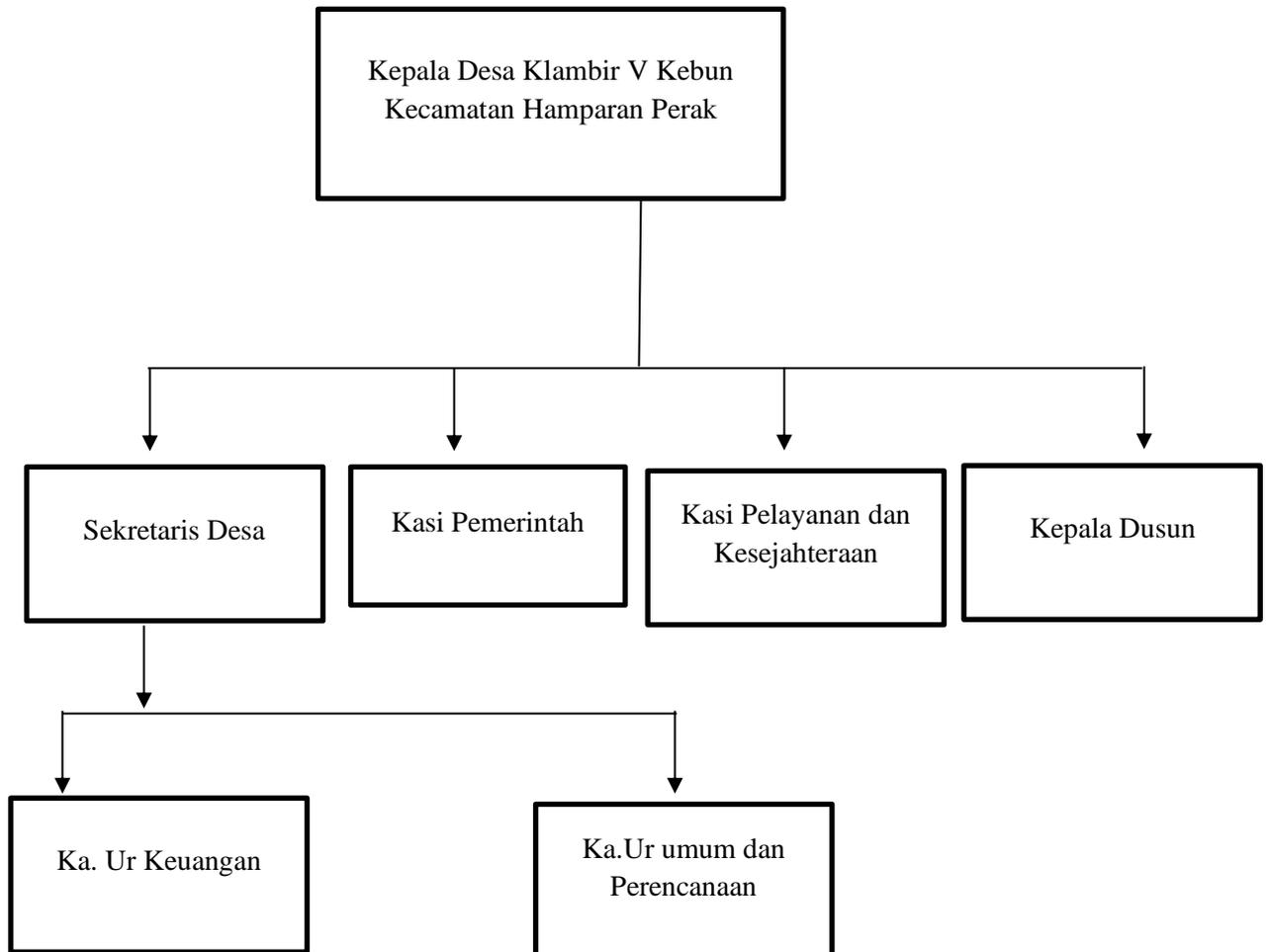
4.1.6 Struktur Organisasi Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hampan Perak

Struktur organisasi merupakan salah satu factor pendukung keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam struktur organisasi terdapat kerangka yang menggambarkan wewenang, tanggung jawab, dan hubungan tiap bagian yang ada didalamnya.

Pada desa Klambir V Kebun Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deliserdang, Kepala Desa menjabat sebagai pemimpin desa dan dibawahnya terdapat Sekretaris Desa, Kasi Pemerintah, Kasi Pelayanan Kesejahteraan, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Umum dan Perencanaan dan Kepala Dusun.

Kerangka struktur organisasi pada Pemerintah Desa dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pemerintah Desa



Sumber: Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hambaran Perak/2023

Berikut ini uraian tugas dari Pemerintah Desa:

1. Kepala Desa

Kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain Perangkat desa sebagai unsur Penyelenggara pemerintah desa (UU No.6 Tahun 2014). Kepala Desa Bertugas menyelenggarakan pemerintahan

desa, melaksanakan Pembangunan desa, pembinaan Masyarakat desa dan pemberdayaan Masyarakat.

2. Sekretaris Desa

Merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa.

3. Kaur Umum dan Perencanaan (Kepala Urusan Umum)

Membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha, dan kearsipan.

4. Kaur Keuangan (Kepala Urusan Keuangan)

Tugas Kaur Keuangan adalah memabantu Sekretaris desa melaksanakan pengelolaan Sumber pendapatan Desa, mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa serta laporan keuangan yang dibutuhkan desa.

5. Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan Rakyat

Membantu kepala Desa untuk mempersiapkan baha perumusan kebijakan teknis penyusunan program kegamaan, serta melaksanakan program pemberdayaan Masyarakat dan social kemasyarakatan.

6. Kasi Pemerintahan

Membantu kepala desa melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan Masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan.

7. Kepala Dusun

Membantu Kepala desa melaksanakan tugas dan kewaiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

4.2 Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil jawaban responden, proses pengolahan data dan analisis hasil pengolahan data yang meneliti tentang "Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan desa di Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak".

4.3 Analisa dan Evaluasi

Penelitian ini menggunakan Analisis data program Statistical Package Social Sciences (SPSS). Responden dalam penelitian ini berjumlah 40 orang dan kuisisioner disebarakan langsung yang berbentuk angket kepada responden. Dilakukan pengujian data menggunakan program Statistical Package Social Sciences versi (22).

Sebelum hasil uji setiap variabel disajikan, terlebih dahulu akan disajikan data demografi responden. Berikut demografi responden yang berisikan informasi mengenai jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan.

Tabel 4.4 Demografi Responden

Uraian		Frekuensi	Persentase %
Jenis Kelamin	Laki-Laki	25	62,5%
	Perempuan	15	37,5%
	Jumlah	40	100%
Usia	20-30	25	62,5%
	31-40	10	25%
	41-50	2	5%
	>50	3	7,5%
	Total	40	100%
Pendidikan	SMA	33	82,5%
	D3	1	2,5%
	S1	6	15%
	Total	20	100%

Sumber: Data klambir V Kebun diolah(2023)

Berdasarkan tabel 4.4 memberikan gambaran demografi responden yang terdiri dari 40 orang. Dari segi jenis kelamin, mayoritas responden adalah laki-laki

(62,5%), sedangkan perempuan menyumbang 37,5% dari total. Dalam kategori usia, sebagian besar responden berada di rentang usia 20-30 tahun (62,5%), diikuti oleh kelompok usia 31-40 tahun (25%), usia di atas 50 tahun (7,5%), dan usia 41-50 tahun (5%). Sementara itu, dari segi pendidikan, mayoritas responden memiliki latar belakang pendidikan SMA (82,5%), diikuti oleh S1 (15%), dan jumlah responden dengan pendidikan D3 sebesar (2,5%). Demikianlah distribusi demografi responden yang tercermin dalam tabel tersebut.

1. Pengujian Instrumen Penelitian

a. Uji Validitas

Uji validitas di masukkan untuk mengukur sejauh mana ketepatan alat ukur penelitian tentang isu atau arti sebenarnya yang diukur. Uji validitas dapat dilakukan dengan membandingkan r_{hitung} dengan r_{tabel} untuk degree of freedom (df) = (N-2), N = 40. Jadi df = 40-2= 38 (Dimana n adalah jumlah responden) dengan α (alpha) 5% (0,05) didapat $r_{tabel} = 0,312$. Jika r_{hitung} positif dan $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka butir pertanyaan tersebut dikatakan valid, begitu pun sebaliknya. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka butir pertanyaan tersebut dikatakan tidak valid. Hasil pengujiannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Akuntabilitas (X1)

Butir Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Akuntabilitas 1	0,638	0,312	<i>VALID</i>
Akuntabilitas 2	0,483	0,312	<i>VALID</i>
Akuntabilitas 3	0,648	0,312	<i>VALID</i>
Akuntabilitas 4	0,453	0,312	<i>VALID</i>
Akuntabilitas 5	0,461	0,312	<i>VALID</i>
Akuntabilitas 6	0,511	0,312	<i>VALID</i>
Akuntabilitas 7	0,450	0,312	<i>VALID</i>
Akuntabilitas 8	0,489	0,312	<i>VALID</i>
Akuntabilitas 9	0,672	0,312	<i>VALID</i>
Akuntabilitas 10	0,512	0,312	<i>VALID</i>

Data diolah terlampir(2023)

Dari tabel 4.5 diatas, butir-butir pertanyaan mengenai Akuntabilitas memperoleh nilai $r_{hitung} >$ dari r_{tabel} . Maka item-item pertanyaan pada variabel Akuntabilitas dapat dinyatakan valid.

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Transparansi(X2)

Butir Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Transparansi 1	0,453	0,312	VALID
Transparansi 2	0,538	0,312	VALID
Transparansi 3	0,707	0,312	VALID
Transparansi 4	0,574	0,312	VALID
Transparansi 5	0,463	0,312	VALID
Transparansi 6	0,557	0,312	VALID
Transparansi 7	0,563	0,312	VALID
Transparansi 8	0,545	0,312	VALID
Transparansi 9	0,444	0,312	VALID
Transparansi 10	0,445	0,312	VALID

Data diolah terlampir(2023)

Dari tabel 4.6 diatas, butir-butir pertanyaan mengenai Transparansi memperoleh nilai $r_{hitung} >$ dari r_{tabel} . Maka item-item pertanyaan pada variabel Akuntabilitas dapat dinyatakan valid.

Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)

Butir Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Pengelolaan Keuangan Desa 1	0,482	0,312	VALID
Pengelolaan Keuangan Desa 2	0,552	0,312	VALID
Pengelolaan Keuangan Desa 3	0,619	0,312	VALID
Pengelolaan Keuangan Desa 4	0,441	0,312	VALID
Pengelolaan Keuangan Desa 5	0,460	0,312	VALID
Pengelolaan Keuangan Desa 6	0,519	0,312	VALID
Pengelolaan Keuangan Desa 7	0,455	0,312	VALID
Pengelolaan Keuangan Desa 8	0,441	0,312	VALID
Pengelolaan Keuangan Desa 9	0,721	0,312	VALID
Pengelolaan Keuangan Desa 10	0,515	0,312	VALID

Data diolah terlampir(2023)

Dari tabel 4.7 diatas, butir-butir pertanyaan mengenai Pengelolaan Keuangan Desa memperoleh nilai $r_{hitung} >$ dari r_{tabel} . Maka item-item pertanyaan pada variabel Akuntabilitas dapat dinyatakan valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji reabilitas dalam penelitian ini menggunakan Cronbach's alpha (α), dimana suatu instrumen dapat dikatakan handal (reliabel) bila nilai $\alpha > 0.60$. Hasil pengujian dari masing-masing instrument dengan menggunakan koefisien alpha adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha (CA)	N of items	Batas CA	Keterangan
Akuntabilitas (X1)	0,717	10	0,6	<i>Reliabel</i>
Transparansi (X2)	0,711	10	0,6	<i>Reliabel</i>
Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	0,704	10	0,6	<i>Reliabel</i>

Data diolah terlampir(2023)

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, dapat dilihat pada Akuntabilitas (X1) nilai Cronbach alpha sebesar $0.717 > 0.60$, Tansparansi (X2) nilai Cronbach alpha sebesar $0.711 > 0.60$ dan Pengelolaan Keuangan Desa (Y) nilai Cronbach alpha sebesar $0.704 > 0.60$ sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan dari transparansi (X1) dalam penelitian ini dinyatakan reliabel. Hasil uji reliabilitas membuktikan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini reliabel, sehingga kuesioner dapat menjadi instrumen yang digunakan secara berulang.

2. Uji Asumsi Klasik

Untuk mendapatkan nilai pemeriksaan yang efisien dari suatu persamaan regresi linier berganda maka perlu dilakukan pengujian dengan memenuhi persyaratan asumsi klasik yang meliputi sebagai berikut:

a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas berguna untuk mengetahui apakah variabel bebas, variabel terikat atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. Uji normalitas

dapat dilakukan dengan menggunakan metode Kalmogorov Smirnov, dengan melihat signifikan pada 0,05. Jika nilai signifikan yang dihasilkan $> 0,05$ maka akan berdistribusi normal, begitupun sebaliknya. Hasil uji normalitas data menggunakan SPSS 22 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.9 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.74097959
Most Extreme Differences	Absolute	.128
	Positive	.128
	Negative	-.120
Test Statistic		.128
Asymp. Sig. (2-tailed)		.095 ^c

a. Test distribution is Normal.

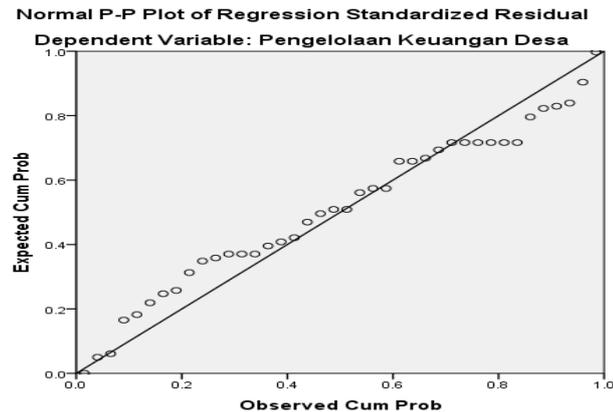
b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data diolah SPSS(2023)

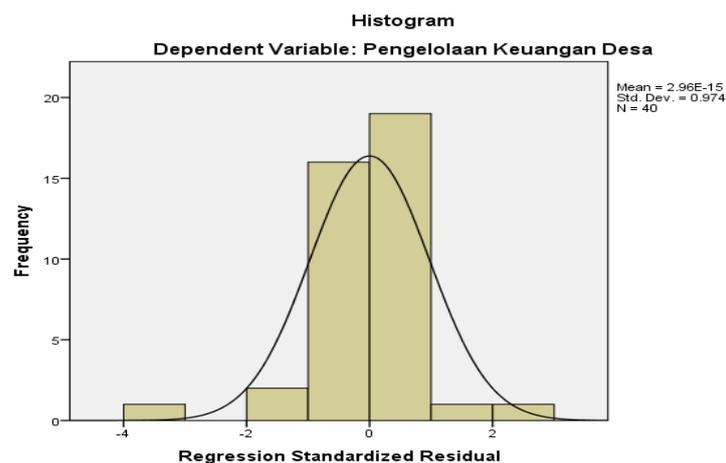
Berdasarkan tabel diatas, nilai signifikan yang dihasilkan sebesar $0,095 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel tersebut berdistribusi normal. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas Kolmogorov Smirnov. Dengan demikian, asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi.

Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas P-Plot



Dari Gambar 4.2 Secara teoritis, suatu Kumpulan data dikatakan mempunyai sebaran normal apabila data tersebut mengikuti garis. Dari gambar di atas terlihat bahwa data menyebar mengikuti garis, dan tidak ada data yang letaknya jauh dari garis, maka sebaran data dapat dikatakan normal.

Gambar 4.3 histogram



Dari Gambar 4.3 di atas maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian telah berdistribusi normal, karena dapat dilihat dari grafik tersebut menunjukkan pola distribusi normal (berbentuk gunung).

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Untuk menguji multikolinieritas dengan cara melihat nilai VIF masing-masing variabel independen, jika nilai VIF < 10.00 maka dapat disimpulkan data bebas dari gejala multikolinieritas.

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	1.082	2.290		.473	.639		
Akuntabilitas	.682	.098	.691	6.986	.000	.237	4.228
Transparansi	.293	.100	.291	2.942	.006	.237	4.228

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Desa

Sumber: Data diolah SPSS(2023)

Tabel 4.10 Uji Multikolinieritas

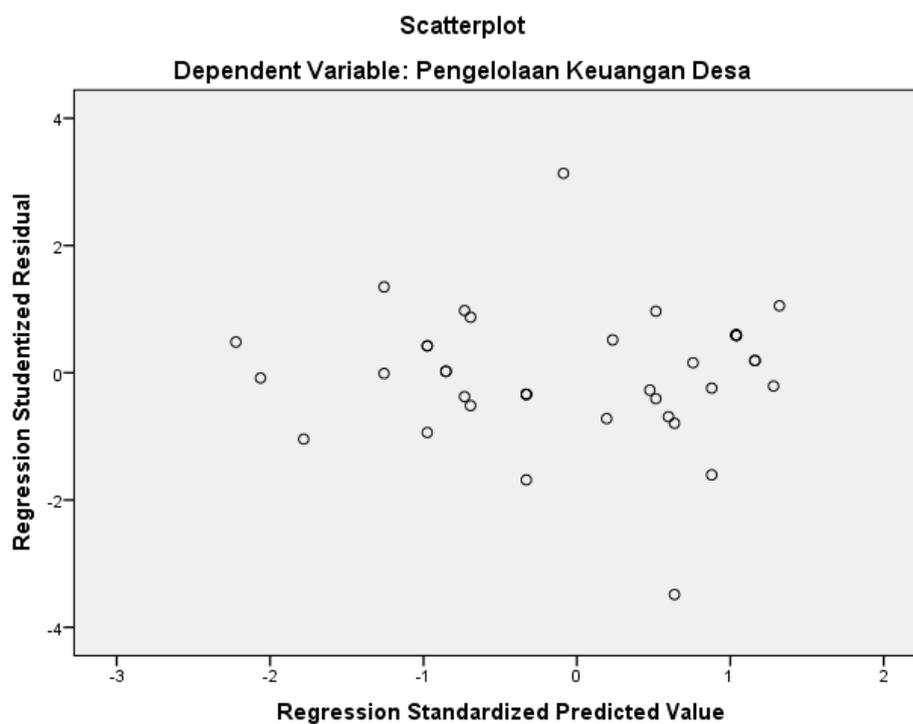
Berdasarkan tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa uji multikolinieritas tidak terjadi korelasi antar variabel, karena nilai tolerance pada masing-masing variabel bebas lebih besar dari 0,10 yaitu sebesar $0,237 > 0,10$. Sedangkan nilai VIF menunjukkan bahwa masing-masing variabel bebas kurang dari 10 yakni sebesar $4.228 < 10$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinieritas dalam model regresi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan secara varians residual satu pengamatan pengamatan lain. Heteroskedastisitas mempunyai suatu keadaan bahwa varian dari residual

(selisih antara nilai observasi dengan nilai prediksi) suatu pengamatan yang lain berbeda. Untuk memenuhi asumsi heteroskedastisitas maka penyebaran residual pada grafik (*scatter plot*) terlihat tidak teratur.

Gambar 4.4 Grafik Scatterplot



Sumber: Hasil Data Diolah SPSS(2023)

Berdasarkan grafik Scatterplot diatas, dapat dilihat bahwa titik menyebar secara acak dan tidak berkumpul di satu tempat. Hal itu membuktikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada data dan sudah memenuhi uji asumsi klasik.

3. Uji Regresi Linear Berganda

Sugiyono (2022), Analisis regresi linear berganda merupakan Teknik analisis data yang digunakan dalam menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4.11. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.082	2.290		.473	.639
	Akuntabilitas	.682	.098	.691	6.986	.000
	Transparansi	.293	.100	.291	2.942	.006

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Desa

Sumber: Hasil Data Diolah SPSS(2023)

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 1.082 + 0,628 X_1 + 0,293 X_2 + e$$

1) Konstanta (α) = 1.082

Nilai konstanta dari persamaan diatas sebesar 1.082 yang berarti apabila variabel transparansi dan akuntabilitas bernilai nol (sama dengan nol), maka pengelolaan keuangan desa sebesar 1.082.

2) Koefisien Akuntabilitas ($\beta_1 X_1$) = 0,628 Pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa adalah positif. Koefisien yang memiliki nilai positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel akuntabilitas akan mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Desa sebesar 0,628.

3) Koefisien Transparansi ($\beta_2 X_2$) = 0,293 Pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa adalah positif. Koefisien yang memiliki nilai positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel Transparansi akan mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Desa sebesar 0,293.

4. Uji Hipotesis

a. Uji t

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018).

Tabel 4.12 Hasil Uji t (Parsial)

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
Model	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	1.082	2.290		.473	.639
	Akuntabilitas	.682	.098	.691	6.986	.000
	Transparansi	.293	.100	.291	2.942	.006

b. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Desa

Analisis uji T sebagai berikut :

1) Pengaruh Akuntabilitas terhadap pengelolaan Keuangan desa

Hipotesis : H1: Terdapat pengaruh signifikan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan keuangan Desa.

Nilai $t_{tabel} = (\alpha/2; (df=n - k))$, $t_{tabel} = (0,025; 40-2-1)$, $t_{tabel} = (0,025; 37) = 2.026$.

Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai variabel Akuntabilitas (X1) t_{hitung} sebesar $6.986 > t_{tabel} 2.026$ dan signifikansi sebesar $0,00 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima. Artinya secara parsial terdapat pengaruh signifikan Akuntabilitas (X1) Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Y) di Desa Klambir V kebun Kecamatan Hamparan Perak.

2) Pengaruh Tranparansi terhadap pengelolaan Keuangan desa

Hipotesis : H2: Terdapat pengaruh signifikan Transparansi terhadap Pengelolaan keuangan Desa.

Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai variabel Transparansi (X2) t_{hitung} sebesar $2.942 > t_{tabel} 2.026$ dan signifikansi sebesar $0,006 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima. Artinya secara parsial terdapat pengaruh signifikan Transparansi (X2) Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Y) di Desa Klambir V kebun Kecamatan Hamparan Perak.

b. Uji F (*Goodness Of Fit*)

Uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual (*Goodness of Fit*). Uji F menguji apakah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah fit atau tidak Ghozali (2018).

Tabel 4.13 Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	228.487	2	114.244	197.404	.000 ^b
	Residual	21.413	37	.579		
	Total	249.900	39			

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Desa

b. Predictors: (Constant), Transparansi, Akuntabilitas

Sumber: Hasil Data diolah SPSS(2023)

Dengan hipotesis:

H3: Terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen (Akuntabilitas dan Transparansi) secara simultan.

Nilai $F_{tabel} = f(k; n-k)$, $F=(2;40-2)$, $F_{tabel}= (2;38)=3,24$ dengan tingkat kesalahan 5% (0,05).

Berdasarkan tabel diatas nilai $F_{hitung} 197.404 > F_{tabel} 3,24$ dan signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau dengan kata lain terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen (Akuntabilitas dan Transparansi) terhadap variabel dependen (Pengelolaan Keuangan Desa) secara bersama-sama (simultan).

c. Uji R² (Koefisien Determinasi)

Koefisien determinasi (R²) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol dan satu, semakin mendekati 0 maka koefisien determinasi semakin kecil pengaruhnya terhadap variabel bebas, sebaliknya semakin mendekati 1 besarnya koefisien determinasi semakin besar pengaruhnya terhadap variabel bebas Ghozali (2018).

Tabel 4.14 Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.956 ^a	.914	.910	.761

a. Predictors: (Constant), Transparansi, Akuntabilitas

b. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Desa

Sumber: Hasil data diolah SPSS(2023)

Berdasarkan tabel 4.14 menunjukkan hasil uji koefien determinasi dari kebutuhan variabel memperoleh nilai R Square sebesar 0,914, yang berarti bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa sebesar 91,4 %. Sedangkan sisanya sebesar 8,6 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

4.4 Pembahasan

Dalam rangka memberikan informasi mengenai pengaruh Akuntabilitas (X1) dan Transparansi (X2) terhadap pengelolaan keuangan desa (Y), maka peneliti telah melakukan penelitian tersebut melalui 40 responden. Penelitian tersebut dilakukan oleh peneliti guna menjawab permasalahan dengan judul “Pengaruh akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hampan Perak”. Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti dengan menggunakan SPSS 22, maka hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:

a. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan pada analisis data yang telah dilakukan, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa “Akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa”, terbukti bahwa akuntabilitas mempunyai pengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini ditunjukkan dengan nilai variabel Akuntabilitas (X1) t_{hitung} sebesar $6.986 > t_{tabel} 2.026$ dan signifikansi sebesar $0,00 < 0,05$. Artinya secara parsial terdapat pengaruh signifikan Akuntabilitas (X1) Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Y) di Desa Klambir V kebun Kecamatan Hampan Perak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Bahtiar dan Ardiansyah, 2019) yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa-Desa Di kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur” Berdasarkan hasil uji t variabel Akuntabilitas di dapat hasil nilai signifikansi sebesar $0,000 < 5\%$, dengan nilai t hitung lebih besar t table ($4,577 > 1.67655$). Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikansi antara variabel Akuntabilitas (X1) terhadap variabel Pengelolaan Keuangan Desa (Y). Adanya pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan

keuangan desa, karena pemerintah desa sebagai entitas pelaporan telah merealisasikan prinsip akuntabilitas, diantaranya yaitu telah melaksanakan pelaporan yang sesuai dengan mekanisme pertanggungjawabannya dan kepatuhan terhadap standar pelaporan.

Penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian terdahulu (Putra, G., Rasuli, M., & Haryani, E. (2017). “Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan Keuangan Daerah, Dan Transparansi Anggaran Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu” Hasil t test memperlihatkan bahwa variabel akuntabilitas keuangan (X1) tidak signifikan di atas 0,05 dengan probabilitasnya sebesar 0,175. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan tidak adanya pengaruh akuntabilitas keuangan terhadap pengelolaan keuangan, maka H1 ditolak. Tidak adanya pengaruh signifikan tersebut dapat dikarenakan berbagai hal diantaranya belum maksimalnya pemanfaatan suatu sistem akuntansi dan sistem anggaran yang dapat menjamin bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pengeluaran keuangan daerah yang dilakukan belum berorientasi pada pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan hasil (manfaat) yang akan dicapai.

b. Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan pada analisis data yang telah dilakukan, hipotesis kedua yang menyatakan bahwa “Transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa”, terbukti bahwa transparansi mempunyai pengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini ditunjukkan dengan nilai variabel Transparansi (X2) t_{hitung} sebesar $2.942 > t_{tabel} 2.026$ dan signifikansi sebesar $0,006 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima. Artinya secara parsial

terdapat pengaruh signifikan Transparansi (X2) Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Y) di Desa Klambir V kebun Kecamatan Hampan Perak..

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Bahtiar dan Ardiansyah, 2019) yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa-Desa Di kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur” hasil uji t variabel Transparansi di peroleh hasil nilai signifikansi sebesar $0,000 < 5\%$, dengan nilai t hitung lebih besar t table ($4,361 > 1,67655$), yang berarti bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel Transparansi (X2) terhadap variabel Pengelolaan Keuangan Desa (Y). Hal ini dikarenakan pemerintah desa telah berupaya melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangannya, diantaranya prinsip tersebut dilaksanakan dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat setiap pencairan dana dari pendapatan transfer, pemasangan baliho tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (LPJRAPBDesa).

Penelitian ini tidak sejalan dengan Ramayanti E (2023) yang berjudul Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (studi kasus pada desa dikecamatan tanah kampung kota Sungai penuh) menyatakan bahwa Variabel Transparansi (X1) tidak mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Desa (Y). Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung $0,596 < t$ tabel $1,987$ dengan nilai signifikansi $0,553 > 0,05$ maka H_0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini dikarenakan kurangnya tingkat transparan atau keterbukaan mengenai keuangan desa, serta masih banyak keterbatasan masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai keuangan desa.

c. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan pada analisis data yang telah dilakukan, hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa “Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa”, terbukti bahwa akuntabilitas dan transparansi secara simultan mempunyai pengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini ditunjukkan dengan nilai $F_{hitung} 197.404 > F_{tabel} 3,24$ dan signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau dengan kata lain terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen (Akuntabilitas dan Transparansi) terhadap variabel dependen (Pengelolaan Keuangan Desa) secara bersama-sama (simultan).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu (Bahtiar dan Ardiansyah, 2019) yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa-Desa Di kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur” hasil uji F_{hitung} adalah 88.073 dan taraf signifikansi 5%. Sehingga dapat dijabarkan $f_{hitung} 88.073 > f_{tabel} 3.19$, dan taraf signifikansi $f_{hitung} 0.000 < f_{tabel} 0.05$, yang artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian variabel Akuntabilitas (X1) dan variabel Transparansi (X2), secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap variabel (Y) Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan pada penelitian ini dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak” maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan Keuangan Desa dapat diterima. Artinya secara parsial terdapat pengaruh signifikan Akuntabilitas (X1) Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Y) di Desa Klambir V kebun Kecamatan Hamparan Perak.
2. Transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan Keuangan Desa dapat diterima. Artinya secara parsial terdapat pengaruh signifikan Transparansi (X2) Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Y) di Desa Klambir V kebun Kecamatan Hamparan Perak.
3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak. Artinya secara simultan terdapat pengaruh signifikan Akuntabilitas (X1) dan Transparansi (X2) Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Y) di Desa Klambir V kebun Kecamatan Hamparan Perak.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti mencoba mengemukakan saran yang mungkin dapat bermanfaat diantaranya sebagai berikut:

1. Diharapkan perangkat desa dapat menambah pendukung laporan pekerjaan setiap kegiatan agar lebih jelas terlihat pembangunan desa untuk kesejahteraan Masyarakat.
2. Diharapkan perangkat desa menambah akses Masyarakat setempat untuk mendapatkan informasi tentang pengelolaan keuangan desa klambir V kebun.
3. Perlunya mengevaluasi penggunaan ADD, agar efektif dan efisien serta tepat sasaran sehingga pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Amsyal, R., Fitri, C. D., & Farma, J. (2021). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Permukiman Mesjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya)*. Ekobis Syariah.
- Andriani, M. (2019). Pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa (studi pada Desa Luk, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa). *E-Journal Akuntansi FEB Universitas Teknologi Sumbawa*, 1(2), 1-13.
- Ardiyanti, N. W. (2019). *Studi Tentang Tingkat Transparansi Informasi Publik Pemerintah di Indonesia*. Jurnal Ilmu Komunikasi.
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aziiz, M. N., & Prastiti, S. D. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas DanaDesa*. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 334.
- Abdiyanto, et al.2023. The development economic growth for sustainable development with augmented dickey fuller (empirical study for neoclassical economic growth from solow and swan). *Kurdish Studies*, 11(2), pp. 3206-3214
- Bahtiar dan Ardiansyah, 2019. *Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa-Desa Di Kecamatan.ejournal.undiksha.ac.id*
- Cynthia, E.P. et al. 2022. Convolutional Neural Network and Deep Learning Approach for Image Detection and Identification. *Journal of Physics: Conference Series*, 2394 012019, pp. 1-6
- Cynthia, E. P., Rahadjeng, I. R., Karyadiputra, E., Rahman, F. Y., Windarto, A. P., Limbong, M., ... & Yarmani, Y. (2021, June). Application of K-Medoids Cluster Result with Particle Swarm Optimization (PSO) in Toddler Measles Immunization Cases. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1933, No. 1, p. 012036). IOP Publishing.
- Chandra,Putu N. 2016. *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Bentuk Implementasi UU No. 6 Tahun 2014*.Skripsi. Mataram : Program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram.
- Chrystiana, Ema. 2017. *Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban dan Aksesibilitas terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wironanggan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo*.Skripsi. Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis IslamInstitut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Dewi &Adi, 2019. *Pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintah desa*. *Media Riset Akuntansi*

Dra/tribun-medan.com.Salah satu desa yang mendapatkan dana desa paling besar di kabupaten tersebut adalah desa Klambir 5 Kebun. *berita sumut Tribun-Medan.com*.

Elisha RY.2023. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh).

Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020) *Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea , Kecamatan Sasitamean ,. Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*.

Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

Hidayat, M., Rangkuty, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.

Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... & Tarigan, A. S. P. (2019, March). UNPAB Lecturer Assessment and Performance Model based on Indonesia Science and Technology Index. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1175, No. 1, p. 012268). IOP Publishing.

Kurniawan,2019. *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng*. ejournal.undiksha.ac.id

Mahmudi. (2019). *Konsep dan Dimensi Akuntabilitas Pemerintah Daerah di Indonesia*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.

Nasib, N., Azhmy, M. F., Nabella, S. D., Rusiadi, R., & Fadli, A. (2022). Survive Amidst the Competition of Private Universities by Maximizing Brand Image and Interest in Studying. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 14(3), 3317-3328.

Nasution, L. N., Suhendi, S., Rusiadi, R., Rangkuty, D. M., & Abdiyanto, A. (2022). Covid-19 Pandemic: Impact on Economic Stability In 8-Em Muslim Countries. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 336-352.

Nasution, L. N., Rusiadi, A. N., & Putri, D. 2022. Impact of monetary policy on poverty levels in five asean countries.

Nasution, L. N., Rangkuty, D. M., & Putra, S. M. (2024). The Digital Payment System: How Does It Impact Indonesia's Poverty?. *ABAC Journal*, 44(3), 228-242.

Nasution, L. N., Sadalia, I., & Ruslan, D. (2022). Investigation of Financial Inclusion, Financial Technology, Economic Fundamentals, and Poverty Alleviation in ASEAN-5: Using SUR Model. *ABAC Journal*, 42(3), 132-147.

Peraturan Menteri Dalam Negri No 20 Tahun 2018 *Pengelolaan Keuangan Desa*.
Kemendagri.go.id.

Putra, G., Rasuli, M., & Haryani, E. (2017). *Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan Keuangan Daerah, Dan Transparansi Anggaran Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu* (Doctoral dissertation, Riau University).

Purba, R., Umar, H., Siregar, O. K., & Aulia, F. (2023). Supervision of Village Financial Management: will it be in Parallel with the Development of Village Officials?(a Study of North Sumatra Province). *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e1930-e1930.

Risya, U., & Nurodin, I. (2017). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi (Jurnal Akuntansi, Pajak dan Manajemen)*, 6(11), 74-80.

Rangkuty, D. M., & Hidayat, M. (2021). Does Foreign Debt have an Impact on Indonesia's Foreign Exchange Reserves?. *Ekilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 16(1), 85-93.

Rusiadi, N. S. (2023). Modeling the Impact of Tourism Brand Love and Brand Trust on Increasing Tourist Revisit Intention: An Empirical Study. *Journal of System and Management Sciences*, 13(4), 399-415.

Rusiadi, S., Novalina, A., NST, N., Efendi, B., & NST, P. (2022). Dynamic rational expectations model and covid-19 on money demand in carisi countries.

Rusiadi, Hidayat, M., Rangkuty, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.

Ruslan, D., Tanjung, A. A., Lubis, I., Siregar, K. H., & Pratama, I. (2023). Monetary Policy in Indonesia: Dynamics of Inflation, Credibility Index and Output Stability Post Covid 19: New Keynesian Small Macroeconomics Approach. *Cuadernos de economía*, 46(130), 21-30.

Suhendi, Rusiadi., Novalina, A., NST, N., Efendi, B., & NST, P. (2022). Post-covid-19 economic stability changes in nine countries of asia pacific economic cooperation.

Astuti, S. (2021). *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan keuangan desa di desa Tamalate Kabupaten Takalar*

Sari, A. N. (2018). *Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Desa Bejijong Kecamatan Trowulan, Mojokerto)*

Sharma, A., & Yadav, R. K. (2018). *Data Analysis Techniques. International Journal of Research in Engineering, Science and Management*

Subandra, Usdeldi, Nofriza AAB : *Jurnal of Applied Accounting And Business*
Vol.4 No.2, 2022

Sugiyono. (2022). *Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, dan R&D.*

Sujarweni, V. Wiratna. (2019) *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi.*
Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sutrawati, 2016. *Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.*

Teddy, et al. 2020. *Pencegahan Fraud Melalui Budaya Organisasi, Good Corporate Governance, dan Pengendalian Internal.* Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa)

Ulfiah, (2017) *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa Di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat.* Ejournal.com

Widagdo, A. W., & Utomo, H. P. (2019). *The Role of Transparency and Accountability on Village Fund Management: An Empirical Study in Indonesia.* Journal of Public Administration and Governance.

Widarman, A., Rahadjeng, I. R., Susilowati, I. H., Sahara, S., & Daulay, M. T. (2022, December). Analytical Hierarchy Process Algorithm for Define of Water Meter. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2394, No. 1, p. 012030). IOP Publishing.

Yanti, E. R., Wiralestari, W., & Tiswiyanti, W. (2023). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh).* Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan